



RENCANA KERJA

2026

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KESEHATAN
JL. JEND. SUDIRMAN KM 2, TELP (0747) 21214 FAX (0746) 21204
BANGKO**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Ketahanan Kabupaten Merangin Tahun 2026. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangko, 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**



drg. H. SONY PROPESMA, M.Ph
NIP. 19711012 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUANA	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS KESEHATAN.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	13
<i>Penetapan Indikator Kinerja</i>	- 41 -
<i>Capaian Analisis Kinerja</i>	- 41 -
<i>Evaluasi Program Tahun 2024</i>	- 41 -
<i>Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025</i>	- 42 -
<i>Permasalahan Utama yang Sedang dihadapi</i>	- 43 -
<i>Solusi yang dilakukan</i>	- 48 -
<i>Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat</i>	- 49 -
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	- 53 -
<i>Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini</i>	- 53 -
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	- 59 -
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	- 65 -
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	- 110 -
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	- 115 -
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	- 115 -
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN	- 120 -
3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN	- 125 -
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	- 165 -
BAB V P E N U T U P	- 185 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	- 19 -
Tabel 2. 2	- 56 -
Tabel 2. 3	- 63 -
Tabel 2. 4	- 64 -
Tabel 2. 5	- 70 -
Tabel 2. 6	- 111 -

No table of figures entries found.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

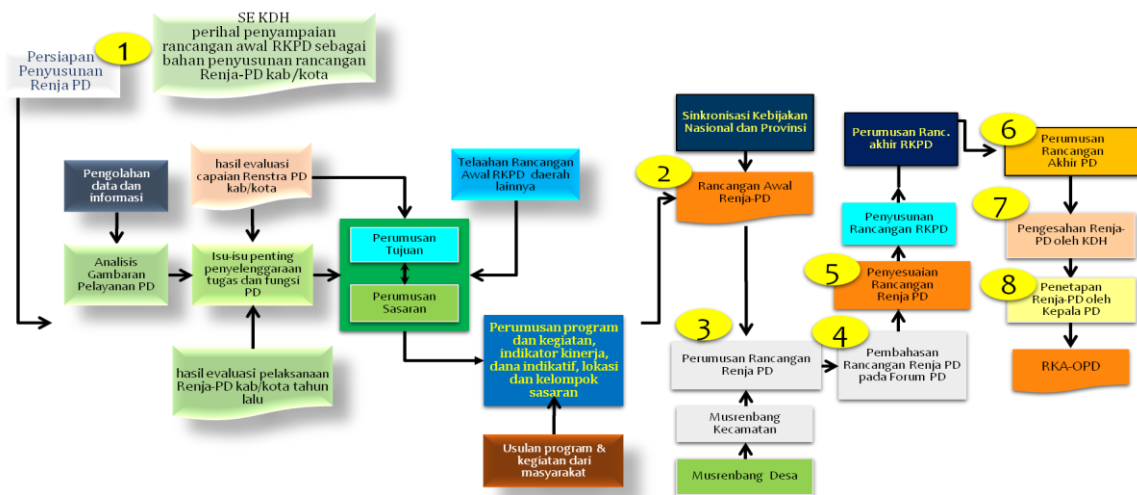
1.1.1. Pengertian Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk mewujudkan visi misi Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merupakan dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

khususnya. Renja tersebut berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategi lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategi OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, “karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terkecil.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Gambar 1.1
Bagan Alur Rancangan Rencana Kerja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Tahapan persiapan penyusunan Renja sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Bagan Alur Rancangan Rencana Kerja diatas, adapun alur dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Persiapan Penyusunan Renja melalui pembentukan tim penyusun, pelaksanaan orientasi, dan penyusunan agenda kerja Tim Renja
- Penyusunan rancangan awal renja berdasarkan Analisis gambaran pelayanan OPD, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, Rekapitulasi RUK Puskesmas, Usulan UPTD Labkesda, UPTD Logistik dan Farmasi, Rumah Sakit dan

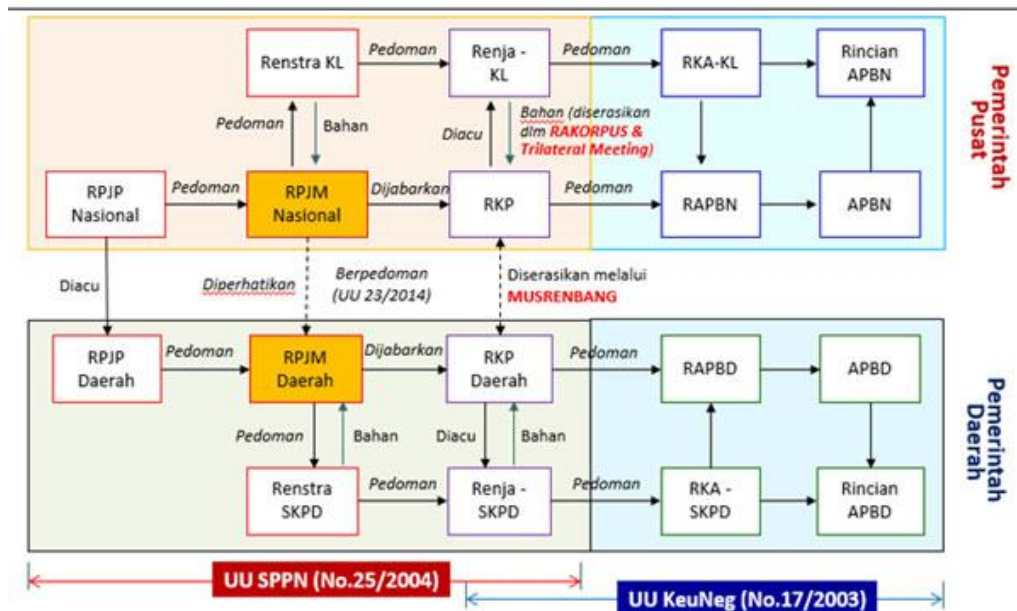
- jejaringannya, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan tujuan dan sasaran Kepala OPD.
- c. Perumusan rancangan renja opd; Telaah usulan program dari masyarakat, Perumusan Kegiatan Prioritas dilaksanakan pada saat Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dengan mereview usulan dari Kecamatan sehingga didapat usulan prioritas yang selanjutnya akan dibahas di Forum OPD.
 - d. Pembahasan usulan Prioritas Masyarakat Forum OPD yang diikuti oleh Kepala Puskesmas, Camat se Kabupaten Merangin, Perwakilan Bidan desa setiap Kecamatan, Kepala OPD terkait Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Lembaga Masyarakat terkait seperti IDI, IBI.
 - e. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran rencana pembangunan perangkat daerah dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan Daerah.
 - f. Penyusunan Rancangan Akhir renja perangkat daerah
 - g. Verifikasi dan Penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
 - h. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam rangka perencanaan yang sistematis sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang sisten perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Adapun alur Perencanaan dan

Penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 1.2 Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Undang-undang No.25 Tahun 2004 dan undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
14. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
20. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pemangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya operasional Pelayanan Kesehatan dalam pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah.
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2010 Nomor 08);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 13, No reg Peraturan Daerah Kabupaten Merangin : 13-87/2021);
39. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15);
40. Renstra DINKES Kab. Merangin 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.
- b. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - 1) Untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan dan jajaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,

- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan untuk mendukung
- 3) target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan,
- 4) Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di embankan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas Kesehatan, Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan, Keterkaitan antar Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan dengan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Merangin.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kesehatan kabupaten Merangin, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN

2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Merangin

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kab. Merangin

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan .
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang

serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Mengenai uraian :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten merangin di sertai dengan Sumber pendanaan dan Rencana Kerja Tahun berikutnya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ataupun ketersediaan penganggaran, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS KESEHATAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dalam melihat realisasi kegiatan yang memenuhi target kinerja dan yang tidak memenuhi target kinerja diukur dari indikator program/kegiatan. Dapat dilihat sebagai berikut :

❖ **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

1. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
5. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

❖ **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dari 81 Sub Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan terdapat 76 Sub Kegiatan dengan kategori telah memenuhi target atau memenuhi tingkat realisasi 100% (Tabel 2.1)

❖ **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan**

A. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Kurangnya ASN yang melaksanakan Tugas dan Fungsi/pelatihan dan Diklat di tahun 2024
 - Pelatihan dan Diklat yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan ASN dan juga kurang motivasi, partisipasi serta informasi berita yang diterima ASN
- 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Anggaran tidak dibelanjakan karena kegiatan telah dibelanjakan di kegiatan lain
- 3) Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - Barang tidak suplai dari penyedia dikarenakan keterbatasan stok dan kendala bahan baku dari penyedia
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Biaya yang ditanggung hanya biaya rujukan sedangkan biaya persalinan tidak ditanggung, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan BPJS untuk persalinannya karena biaya persalinan dan rujukan langsung ditanggung
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

- Mekanisme Ganti Uang (GU) yang lambat dan bernilai kecil sementara semua program mengajukan klaim pembayaran sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Anggaran pada awal tahun dibekukan oleh Kemenkes sehingga tidak bisa dicairkan jadi sebagian anggaran di ambil alih oleh bidang Yankes untuk Akreditasi sebesar Rp. 700.000.000,00 dari total Rp. 1.200.000.000.000,00 untuk pembelian Catrik TCM (dana BMHP)
- 7) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Mekanisme Ganti Uang (GU) yang lambat dan bernilai kecil, sementara semua program mengajukan klaim pembayaran sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa di bayarkan
- 8) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Kegiatan akreditasi tahun 2024 mendapatkan dana tambahan dari Catrid TCM yang tadinya 3 puskesmas menjadi 17 puskesmas, dengan pertimbangan menyediakan tiket pesawat untuk surveior apabila surveior nya berada di luar provinsi. Tetapi semua surveior yang datang untuk survei di tahun 2023 datang dari dalam provinsi sehingga semua tiket pesawat pulang pergi yang disiapkan tidak terpakai
- 9) Instigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- Mekanisme Ganti Uang (GU) yang lambat dan bernilai kecil, sementara semua program mengajukan klaim pembayaran sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa di bayarkan
- 10) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- Sistem pencairan anggaran yang menggunakan dana Ganti Uang (GU) tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan, dan pencairan GU tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan PKB (Pelayanan Kesehatan Bergerak)
- 11) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pelatihan bekerja sama dengan pihak Bapelkes, SPK baru disepakati akhir bulan September 2024, dan pelatihan berdasarkan penjadwalan dari Bapelkes mengingat terbatasnya fasilitator, MOT, TOT, QC.

B. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya kinerja program atau kegiatan

- 1) Adanya perencanaan yang jelas dan operasional terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
- 2) Tersedianya dana sesuai kebutuhan dan alokasinya
- 3) Terpenuhinya persyaratan administrasi terkait kinerja program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
- 4) Tersedianya SDM yang memadai untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan
- 5) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
- 6) Adanya regulasi yang jelas terkait program atau kegiatan yang dilaksanakan
- 7) Adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam melaksanakan program atau kegiatan
- 8) Adanya dukungan masyarakat, tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan

❖ **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa program kegiatan yang telah mencapai target dan belum mencapai target sehingga tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target di RENSTRA. Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026 mengalami dalam Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap Renstra dinas Kesehatan. Implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan

dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat. Target capaian program dan kegiatan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.1 tentang rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bawah ini :

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
Program dan Kegiatan Tahun 2024										
A	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99%	96,09%	98%	92,17%	94%	98%	94,13%	19,8%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	99%	99%	100%	99,5%	20%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	8 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	4 Dokumen	1 Dokumen
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Laporan	12 Dokumen	1 Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	96%	96%	100%	98%	20%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1850 Orang	3.178 Orang	1,089 Orang	1.089 Orang	100%	1.740 Orang	4.267 Orang	370 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	1 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	1 Laporan
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		98%	100%	100%	100%	100%	99%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	2 Laporan
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99%	100%	58%	58%	100%	78,5%	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	3 Orang	3 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	3 Orang	1 Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	2 Orang	6 Orang	0 Orang	0%	8 Orang	2 Orang	1 Orang
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	10 Paket	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	-	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	1 Paket

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	1 Paket
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	4 Laporan	125 Laporan	80 Laporan	64%	100 Laporan	84 Laporan	20 Laporan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	7 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	1 Unit
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97%	100%	98%	98%	100%	97,5%	20%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	91,6%	12 Laporan	23 Laporan	2 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	11 Laporan	91,6%	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	94%	94%	94%	100%	95%	94%	19,2%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	17 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	61 Unit	24 Unit	2 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	1 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	26 Unit	13 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	30 Unit	13 Unit
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	1 Unit
10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	97%	-	94%	85%	90,442%	96%	85%	19,4%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	-	92%	82,9%	90,1%	27 Unit	82,9%	1 Unit
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Indikator Nasional Mutu	75%	61,21%	65%	59,12%	90,95%	69%	60,16%	15%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya			81%				-	
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	73%	61%	70%	68%	97,14%	70%	64,5%	14,6%
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	15 Unit	3 Unit	210 Unit	29 Unit	13,8%	14 Unit	32 Unit	3 Unit
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	83 Unit	83 Unit	100%	-	83 Unit	-
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	34 Unit	8 Unit	45 Unit	45 Unit	100%	22 Unit	53 Unit	7 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	1 Unit	1 Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	49 Unit	788 Unit	728 Unit	92,38%	1 Unit	777 Unit	1 Unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	49 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	55 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	420 Unit	-	50 Unit	50 Unit	100%	420 Unit	50 Unit	84 Unit
	Pengadaan Obat, Bahan Habias Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman, di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	380	91 Paket	120 Paket	29 Paket	24,16%	380 Paket	120 Paket	76 Unit
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke	395	280 Kali	280 Kali	70 Kali	25%	332 Kali	350 Kali	79 Kali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya								
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	100%	7%	100%	89%	89%	100%	48%	20%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.910 Orang	6.479 Orang	7.421 Orang	5.615 Orang	75,66%	6.708 Orang	12.094 Orang	1382 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.618 Orang	6.253 Orang	7.165 Orang	7.152 Orang	99,81%	6.424 Orang	13.405 Orang	1.323 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.030 Orang	6.206 Orang	7.149 Orang	5.936 Orang	83%	5.828 Orang	12.142 Orang	1.206 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31.239 Orang	44.832 Orang	26.439 Orang	22.318 Orang	84,41%	30.321 Orang	67.150 Orang	6.246 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78.333 Orang	-	12.341 Orang	1.652 Orang	13,38%	77.580 Orang	1.652 Orang	15.666 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	362.819 Orang	-	221.734 Orang	45.414 Orang	20,48%	285.075 Orang	45.414 Orang	72.564 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.143 Orang	-	30.452 Orang	9.463 Orang	31%	26.405 Orang	9.463 Orang	7.028 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69.145 Orang	43.834 Orang	66.846 Orang	33.411 Orang	49,98%	67.112 Orang	77.245 Orang	13.829 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.555 Orang	2.882 Orang	2.896 Orang	1.300 Orang	44,88%	3.450 Orang	4.182 Orang	711 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	559 Orang	457 Orang	526 Orang	262 Orang	49,8%	543 Orang	719 Orang	112 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4.035 Orang	3.036 Orang	3.123 Orang	1.522 Orang	48,73%	5.799 Orang	4.558 Orang	807 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.411 Orang	5.404 Orang	9,828 Orang	3.483 Orang	35,43%	7.477 Orang	8.887 Orang	1.282 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	4 Dokumen	16 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,3%	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	4 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	66,6%	4 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	12 Orang	10 Orang	3 Orang
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	33,3%	4 Dokumen	14 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	4 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen	108 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	27 Dokumen	109 Dokumen	5 Dokumen
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	13 Dokumen	2 Dokumen
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	747 Orang	-	1.103 Orang	166 Orang	15%	1.074 Orang	166 Orang	149 Orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria Sesuai Stndar	4.106 Orang	-	39.112 Orang	869 Orang	2,22%	5.606 Orang	896 Orang	821 Orang
13		Puskesmas Terakreditasi Minimal Madya		-	81%	69%	85,18%	85%	69%	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit	17 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	-	27 Unit	2 unit
14	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Sistem Informasi Kesehatan yang Diselenggarakan secara Terintegrasi	92%	80%	82%	82%	100%	86%	81%	18,4%
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen
15	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	91%	52%	81%	81%	100%	89%	66,5%	18,2%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Unit	116 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	29 Unit	145 Unit	6 Unit
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	55%	15,15%	30%	28,24%	94,13%	40%	21,69%	11%
16	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Rencana Kebutuhan di Fasilitas Kesehatan	36%	148 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	30%	150 Dokumen	7,2%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen
17	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Persentase SDM yang mengikuti Uji Kompetensi	30%	42%	81%	76%	93,82%	15%	59%	6%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota									
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	220 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	100%	220 Orang	420 Orang	44 Orang
D	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kefarmasian yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	67%	54,28%	62%	61,97%	99,95%	63%	85,26%	13,4%
18	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	75%	60 Sarana	55 Sarana	55 Sarana	100%	60%	115 Sarana	15%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	2 Sarana	62 Sarana	35 Sarana	53,8%	2 Dokumen	37 Sarana	1 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
19	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang Mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan dan No P-IRT	75%	50 Sarana	35 Sarana	35 Sarana	100%	60%	85 Sarana	15%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	1 Dokumen	36 Dokumen	1 Dokumen
20	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga sesuai Standar	100%	55 Sarana	60 Sarana	60 Sarana	100%	100%	115 Sarana	20%
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-	57 Unit	62 Unit	62 Unit	100%	62 Unit	119 Unit	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
E	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup Sehat	73%	8,83%	67%	64,23%	95,86%	64%	36,53%	14,6%
21	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Promosi Kesehatan	24 Kecamatan	77%	85%	68%	80%	24 Kecamatan	72,5%	5 Kecamatan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	1 Dokumen
22	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Persentase Kecamatan dengan Posyandu Aktif	65%	49%	55%	53%	96,36%	35%	51%	13%
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai realisasi dari target kinerja tahun 2024 sampai dengan 2026 dengan Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

Capaian target realisasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024 telah mencapai 72,28% atau Rp.169.983.697.632,96 dari total anggaran Rp.235.162.419.931 yang dialokasikan. Rincian realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa) sebesar Rp.148.542.798.682,96 (70,04%) dari total anggaran sebesar Rp.212.095.077.697
- b. Belanja modal sebesar Rp.21.440.898.950 (92,95%) dari total anggaran Rp.23.067.342.234

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan dana sebesar Rp.288.076.566.912 terurai dalam 5 program dan 21 kegiatan dan 433 Sub kegiatan yang diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis dan Rencana Pembangunan Daerah, dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun secara global.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun oleh Dinas Kesehatan merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (***strenghts***), Kelemahan (***weakness***), Peluang (***opportunities***), dan Tantangan (***threats***) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tiga tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Permasalahan Utama yang Sedang dihadapi

Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Namun masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan masalah besar. Dengan demikian, pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. AKI telah mengalami penurunan yang cukup baik, menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007).

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena komplikasi yang terjadi pada kehamilan persalinan dan nifas atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) salah satu isu di bidang kesehatan dari rencana aksi global yang disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia, melalui Sustainable Development Goals (SDGs). AKI merupakan salah satu indikator kesehatan selain ekonomi dan tingkat pendidikan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Dalam rangka mencapai kesepakatan SDGs, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan target AKI pada tahun 2024 adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi dan Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kematian bayi secara intrinsik lebih erat kaitannya dengan kesehatan ibu sebelum, selama dan setelah persalinan, artinya faktor risiko yang ada pada ibu akan mempengaruhi faktor risiko pada bayi. Untuk itu dalam menurunkan AKB perlu dipersiapkan sejak awal mulai dari calon ibu (remaja putri), serta lingkungan baik lingkungan sosial dan ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan bayi baik secara fisik, mental dan spiritual dalam setiap tahap kehidupan

Kematian neonatal adalah kematian bayi baru lahir pada usia neonatal (usia 0-28 hari) sedangkan kematian bayi adalah kematian bayi dengan usia 28 hari -11 bulan kematian bayi didefinisikan sebagai jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran yang terjadi dalam kurun satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik-buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Secara nasional Angka Kematian Bayi (AKB) telah menurun dari 24 kematian per 1.000 Kelahiran Hidup (SDKI, 2017) menjadi 16,85 kematian per 1.000 Kelahiran Hidup (Sensus Penduduk, 2020).

Hasil tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan, di bawah prevalensi target yaitu 16% kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Merangin telah berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, seperti dapat dilihat dari data di bawah ini:

1. Tabel Data Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Merangin

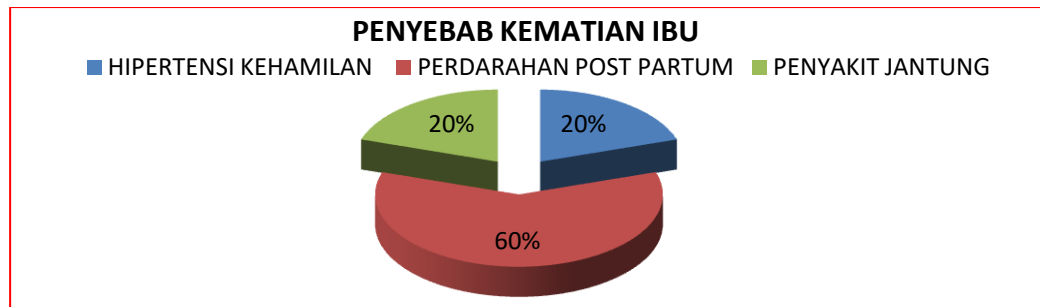
DATA KEMATIAN KAB. MERANGIN							
NO	KABUPATEN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DATA KELAHIRAN Hidup	7194	7002	6677	6365	6225	5447
2	Jumlah kematian bayi (berumur < 1 Tahun)	32	40	45	26	36	35
		4,45/1000 KH	5,71/1000 KH	6,74/1000 KH	4,08/1000 KH	5,78/1000 KH	6,43/1000 KH
3	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	9	5	8	6	5	5
		125,1/100.000 KH	71,4/100.000 KH	119,8/100.000 KH	94,26/100.000 KH	80,32/100.000 KH	91,79/100.000 KH
4	Jumlah kematian Neonatal 0-28 hari	27	36	43	23	30	33
		3,75/1000 KH	5,41/1000 KH	6,44/1000 KH	3,61/1000 KH	4,82/1000 KH	6,06/1000 KH
5	Jumlah kematian Balita	3	1	1	1	0	1
		0,41/1000 KH	0,14/1000 KH	0,14/1000 KH	0,15/1000 KH	0	0,18/1000 KH

Sumber : Data Bidang Kesmas Tahun 2024

1. Data Kematian Ibu

Dari data diatas dapat diketahui jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2022 ada 6 kasus kematian ibu, tahun 2023 ada 5 kasus kematian ibu dan, di tahun 2024 ada 5 kasus kematian ibu, data kematian ibu stagnan tidak ada terjadi penurunan kasus kematian ibu pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dikonversikan data kematian ibu di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 adalah 94,26/100.000 KH dan pada tahun 2023 adalah 80,32/100.000 KH, pada tahun 2024 adalah 91,79/100.000 KH angka ini sudah mencapai target nasional yaitu prevalensi dibawah 183/100.000 KH, namun demikian dilihat dari kejadian kasus setiap tahun bahwa data tersebut dapat terjadi fluctuation setiap tahunnya.

Persentase menurut Penyebab kematian ibu di kabupaten Merangin Tahun 2024 adalah:



Dari data tersebut diketahui penyebab Kematian ibu tahun 2024 di Kabupaten Merangin disebabkan penyebab langsung karena perdarahan 60%, hipertensi dalam kehamilan 20%, gangguan metabolic/peredaran darah 20%, hal ini penyebab yang berhubungan langsung dengan kondisi komplikasi pada ibu masa sebelum hamil, masa persalinan dan masa setelah persalinan.

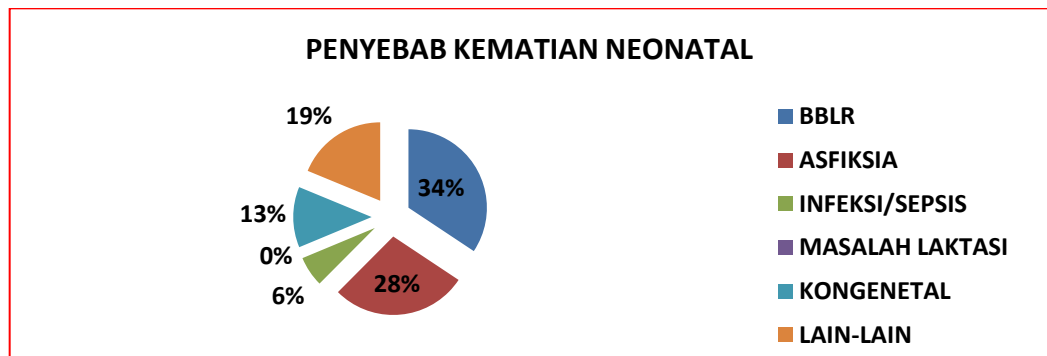
Adapun permasalahan dan penyebab lain yang berpengaruh terhadap faktor terjadinya kematian ibu adalah:

- a) Masih adanya persalinan dirumah dan persalinan ditolong non tenaga kesehatan
- b) Pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil (ANC) belum berkualitas
- c) Belum optimalnya deteksi dini dan tindak lanjut penanganan komplikasi obstetric pada ibu hamil dan ibu bersalin sesuai standar
- d) Belum semua ibu melahirkan mempunyai jaminan kesehatan
- e) Masing tingginya kasus anemia dan KEK pada ibu hamil
- f) Belum optimalnya skrening layak hamil pada calon pengantin perempuan
- g) Sarana prasarana Puskesmas PONEC belum semua terpenuhi Kompetensi tenaga kesehatan penanganan kegawatdarurat obstetric dan neonatal dan PONEC
- h) Ketersediaan SDM tenaga kesehatan belum mencukupi di Puskesmas (Dokter umum, perawat, tenaga gizi, analis kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan)
- i) Belum maksimalnya kordinasi lintas sektoral terkait, pemberdayaan tokoh masyarakat, toko agama, keluarga dan masyarakat untuk P4K dan kemitraan bidan dan dukun
- j) PMI belum optimal (ketersediaan darah)
- k) Akses geografis, pengetahuan masyarakat, social ekonomi masyarakat
- l) Belum semua ibu hamil memiliki jaminan kesehatan

2. Data Kematian Neonatal dan kematian bayi

Definisi Operasional Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup pada masa 0-28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Rumus Penghitungan Indikator Angka Kematian Neonatal adalah jumlah kematian bayi lahir hidup yang terjadi pada masa 0-28 hari setelah lahir di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Dari data diatas dapat diketahui jumlah kasus kematian neonatal tahun 2022 yaitu 23 kasus kematian neonatal, tahun 2023 yaitu 30 kasus kematian neonatal dan di tahun 2024 yaitu 33 kasus kematian neonatal. Jika di konversikan kematian. Untuk data konversi Angka Kematian neonatal tahun 2022 adalah 3,61/1000 KH, dan tahun 2023 adalah 4,82/1000 KH, pada tahun 2024 adalah 6,06/1000 KH, Target nasional angka kematian neonatal adalah 10/1000 KH Kabupaten sudah mencapai target

Persentase Penyebab Kematian Neonatal di Kabupaten Merangin Tahun 2024:



Dari data tersebut diketahui penyebab Kematian neonatal tahun 2024 di Kabupaten Merangin disebabkan oleh asfiksia 28,10%, penyebab kematian karena BBLR 34,10%, karena infeksi 6,25%, kelainan kongenetal 12,50% dan penyebab lainnya 18,75% penyebab ini berhubungan langsung dengan komplikasi pada bayi baru lahir

Definisi Operasional Kematian bayi adalah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) adalah kematian neonatal ditambah dengan kematian bayi atau data kematian bayi yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Dengan Rumus Penghitungan Indikator Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah

tersebut dan pada kurun waktu yang sama dibagi 1.000 kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

Di Kabupaten Merangin kasus kematian bayi sebanyak 36 kasus pada tahun 2023 jika dan tahun 2024 jumlah kematian bayi adalah 35 kasus, terjadi penurunan kematian bayi pada tahun 2023. Jika dikonversikan data kematian bayi di Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah 5,78/1000 KH, pada tahun 2024 adalah 6,42 KH/1000 dan untuk target nasional yaitu prevalensi dibawah 16/1000 KH, namun demikian dilihat dari kejadian kasus setiap tahun bahwa data tersebut terjadi fluctuation kasus kematian bayi di Kabupaten Merangin. Target nasional kematian bayi adalah 16/1000 KH.

Untuk kejadian kasus kematian bayi umur 29 hari – 11 bulan di kabupaten merangin tahun 2022 terdapat 3 kasus kematian, di tahun 2023 terdapat 6 kasus kematian bayi dan di tahun 2024 ada 2 kasus kematian bayi pada usia tersebut. Terjadi penurunan kasus kematian bayi jika dibandingkan dengan dengan tahun 2023 dan 2024. Target nasional kematian bayi adalah 25/1000 KH. Adapun penyebab kematian bayi 29-hari – 11 bulan adalah 50% karena infeksi dan 50% penyebab lainnya.

Kejadian kasus kematian Balita 12 bualan – 59 bulan kasus kematian balita di tahun 2022 ada 1 kasus kematian, tahun 2023 ada 0 kasus kematain balita, tahun 2024 ada 1 kasus kematian balita. Terjadi peningkatan kasus kematian balita di tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023 Jika di konversikan dalam Angka Kematian Balita tahun 2022 adalah 0,15/1000 KH, tahun 2023 adalah 0,00/1000 KH sedangkan tahun 2024 menjadi 0,18/1000 KH.

Adapun permasalahan dan penyebab lain yang berpengaruh terhadap faktor terjadinya kematian bayi adalah:

- a. Belum semua tenaga kesehatan di Puskesmas terlatih penanganan kegawat darurat obstetrik dan neonatal dan belum semua Tim PONED terlatih
- b. Masih adanya persalinan dirumah dan persalinan ditolong non tenaga kesehatan
- c. Belum maksimalnya kordinasi lintas sektoral terkait, pemberdayaan tokoh masyarakat, toko agama, keluarga dan masyarakat untuk P4K dan kemitraan bidan dan dukun
- d. Akses yang jauh Puskesmas PONED dari RS rujukan

- e. Masing tingginya kasus anemia dan KEK pada ibu hamil
- f. Sarana prasarana Puskesmas PONEC belum semua terpenuhi sesuai standar
- g. Sarana Prasarana fasilitas Rujukan Puskesmas untuk komplikasi Neonatal ke RS rujukan belum sesuai standar
- h. Masalah kebersihan lingkungan, ekonomi social, pengetahuan/pendidikan masyarakat
- i. Sarana Prasarana Puskesmas, Puskesmas pembantu dan RS penanganan pelayanan kesehatan anak belum sesuai standar
- j. Belum semua Bayi dan balita memiliki jaminan kesehatan

Solusi yang dilakukan

Dalam upaya penanggulangan masalah Kesehatan diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kematian ibu dan kematian bayi adalah:

1. Pencegahan anemia pada Remaja Putri dan Skrening layak hamil pada calon pengantin
2. Pencegahan Kehamilan yang tidak di inginkan (kehamilan Remaja) Kehamialn 4T (usia terlalu tua, usia terlalu muda, jarak anak terlalu dekat, anak lebih dari 3) dan peningkatan aseptor KB
3. Penguatan koordinasi dan integrasi Lintas sektor terkait, TOMA, TOGA, Keluarga dan masyarakat dan Lintas program terkait upaya penurunan AKI da AKB

4. Peningkatan kualitas Pelayanan ANC pada ibu hamil
5. Ketersediaan sarana prasarana, obat, reagen pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di Fasilitas kesehatan sesuai standar
6. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (Dokter, bidan, perawat di Puskemas) pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, Pendampingan Puskesmas PONEK oleh RSUD PONEK
7. Optimalisasi ketersediaan darah donor (PMI)
8. Penguatan Akses sistim rujukan di fasilitas kesehatan
9. Peningkatan asektor KB (pasca salin dan MKJP)
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan
11. Jaminan kesehatan bagi semua masyarakat
12. Peningkatan SDM tenaga kesehatan kompetensi pelayanan kesehatan ibu dan anak berkualitas

Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 HPK. Pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil perlu mendapat perhatian untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting akan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa. Akibat kekurangan gizi pada 1000 HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi. Mulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

1. Data Stunting Kabupaten

Secara nasional prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan, dari 24,4% di tahun 2021 (Survei Status Gizi Indonesia, 2021) menjadi 21,6% di Tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Hasil tersebut merupakan hal baik namun masih perlu peningkatan, karena masih dibawah target Tahun

2022 yaitu 18,4%. Diperlukan usaha dan Kerjasama antar Lintas Program dan Sektor yang kuat guna mencapai target RPJMN Tahun 2024 yaitu 14%.

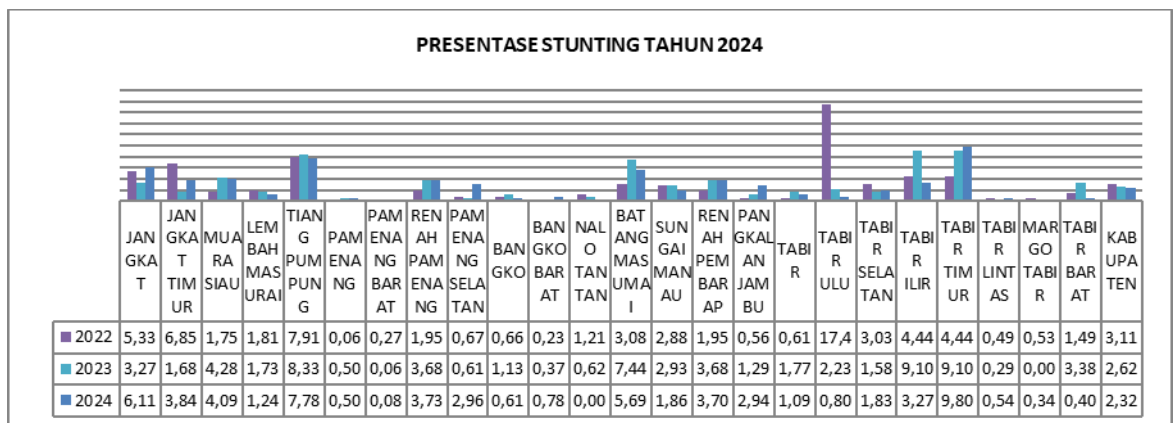
Tabel Presentase Prevalensi Stunting Kabupaten Merangin menurut survei:

PREVALENSI STUNTING PROVINSI JAMBI							
No.	Kabupaten/Kota	2013 (Riskesdas)	2018 (Riskesdas)	2020 (SSGBI)*	2021 (SSGBI)*	2022 (SSGBI)*	2023 (SKI)**
1.	Kerinci	55,3	42,2	33,85	26,7	24,2	8,7
2.	Merangin	37,5	35	15,38	19,7	14,5	14,9
3.	Sarolangun	40,8	18,8	19,06	21,4	16,8	4,8
4.	Batanghari	39,5	32,8	27,32	24,5	26,6	10,1
5.	Muaro Jambi	50	20,7	13,51	27,2	18,6	12
6.	Tanjung Jabung Timur	48,5	40,9	20,05	25,6	22,5	23,7
7.	Tanjung Jabung Barat	29,6	44	21,81	19,8	9,9	14,1
8.	Tebo	41,4	33	30,13	26,2	25	22,7
9.	Bungo	34,5	20,7	27,57	22,9	15,4	13,7
10.	Kota Jambi	24,6	26,2	18,62	17,4	14	13,5
11.	Kota Sungai Penuh	36,9	35,8	25,66	25	26	4,1
	PROVINSI	37,2	30,1	21,03	22,4	18	13,5

Dari tabel di atas berdasarkan hasil survei SSGBI tahun 2021 presentase stunting kabupaten Merangin 19,7% mengalami penurunan presentase dari hasil survey SSGBI di tahun 2022 menjadi 14,5% dan di tahun 2023 dari hasil survei SKI mengalami peningkatan presentase stunting menjadi 14,9%.

Data persentase kasus stunting bersumber dari data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (ePPGBM)

1) Grafik Presentase Kasus Stunting Kecamatan di Kab. Merangin



Sumber data aplikasi ePPGBM Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui persentase kasus stunting Kabupaten Merangin dari hasil ePPGBM tahun 2021 adalah 3,49% dan pada tahun 2022 adalah 3,11% sedangkan pada tahun 2023 adalah 2,62%, dan pada tahun 2024 presentase stunting 2,32% terjadi penurunan persentase kasus stunting pada

tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 data bersumber dari ePPGBM (elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat).

Permasalahan penyebab stunting di Kabupaten Merangin adalah:

- a. Masih tingginya ibu hamil anemia 14% dan ibu hamil KEK 15,6%
- b. Masih tingginya kasus BBLR 4,28%
- c. Belum Optimalnya PHBS pada keluarga
- d. Belum Optimalnya STBM
- e. Permasalahan intervensi spesifik pencegahan stunting:
 - a) Pemeriksaan anemia pada remaja putri 7,84% dari target 49%
 - b) Calon pengantin wanita minum obat TTD 32,94% dari target 50%
 - c) Keluarga PHBS 22,13% (laporan rutin Puskesmas determinan stunting)
- f. Pola Asuh keluarga terhadap balita
- g. Kurangnya pengetahuan keluarga terhadap PMBA
- h. Tidak optimalnya Balita dilakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulan ke posyandu
- i. Sarana prasarana posyandu yang masih belum sesuai standar
- j. Pengetahuan keluarga pentingnya gizi pada 1000 HPK
- k. Belum berkualitasnya manajemen program berbasis aplikasi
- l. Belum optimalnya praaktik baik MP-ASI pada keluarga
- m. Belum semua Ibu dan anak memiliki jaminan kesehatan
- n. Ekonomi, social dan pengetahuan masyarakat

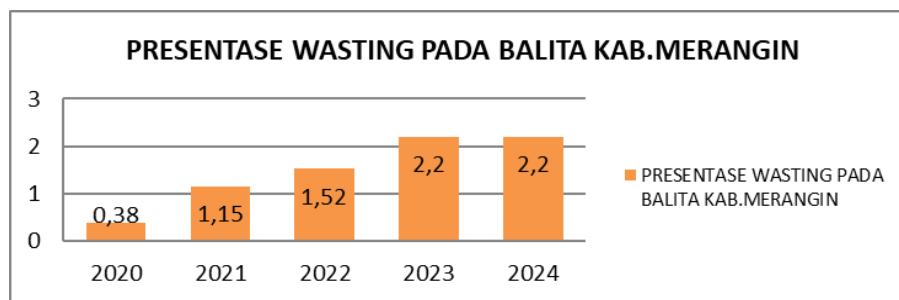
Upaya yang dilakukan dalam pencegahan stunting pada Balita adalah:

1. Upaya percepatan pencapaian target intervensi spesifik dan sensitive dilakukan dengan optimal. Koordinasi dan penguatan peran sektoral di semua level yang berkontribusi terhadap intervensi spesifik dan sensitive pemanfaatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, dan kerja sama dan dukungan universitas/ perguruan tinggi dan organisasi profesi
2. Pecepatan Stunting yaitu dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dimulai dari sebelum lahir, setelah lahir, serta sebelum dan setelah lahir (1000 HPK). Dengan sasaran berfokus pada Remaja Putri, Ibu Hamil, Balita, dan Masyarakat Umum. Dan skrening layak hamil bagi calon pengantin
3. Peningkatan pemanfaatan pangan lokal untuk Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang melalui pendidikan gizi yang

mengombinasikan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan gizi ibu hamil juga meningkatkan kemampuan ibu hamil agar mengonsumsi makanan bergizi sesuai kebutuhan pada masa hamil

4. Peningkatan pelaksanaan pemantauan tumbuh kembang balita dan pelaksanaan tata laksana balita gizi buruk, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan non kesehatan (kader)
5. Pencegahan Kehamilan yang tidak di inginkan (kehamilan Remaja) Kehamilan 4T (usia terlalu tua, usia terlalu muda, jarak anak terlalu dekat, anak lebih dari 3) dan peningkatan aseptor KB
6. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan
7. Jaminan kesehatan bagi semua masyarakat

2. Wasting pada Balita



Dari data diatas dapat diketahui bawah untuk kasus wasting pada balita di Kabupaten Merangin tahun 2021 adalah 1,15%, tahun 2022 persentase wasting 1,52% dan di tahun 2023 adalah 2,20 % dan pada tahun 2024 persentase wasting 2,2%. Tidak adanya penurunan persentase wasting dari tahun sebelumnya tetapi peningkatan persentase wasting di Kabupaten Merangin masih dibawah prevalensi nasional target 2,5%

Adapun penyebab peningkatan persentase wasting adalah:

Balita tidak mendapat makanan dengan kualitas dan kuantitas gizi yang memadai, karena penyakit infeksi tertentu seperti infeksi pencernaan dan infeksi pernapasan yang tidak segera ditangani dengan baik. Kurangnya pengetahuan keluarga pemberian makan balita dan anak (PMBA). Pemantauan pertumbuhan balita dan pemanfaatan buku KIA yang tidak optimal, kurangnya kebersihan lingkungan, keluarga tidak PHBS, pola asuh keluarga, faktor ekonomi keluarga

Upaya pencegahan terjadinya wasting pada balita di Kabupaten Merangin:

1. Penguatan Koordinasi lintas sektor dan lintas program, TOMA, TOGA, PKK dan masyarakat upaya pencegahan dan penanganan kasus gizi wasting pada balita
2. Komunikasi perubahan perilaku membangun lingkungan pendukung yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berinisiatif, mempraktikkan, dan mempertahankan perilaku positif peningkatan kesehatan bagi keluarga (PHBS, STBM, Pemanfaatan posyandu dan Kelas Ibu balita)
3. Peningkatan pengetahuan keluarga, Kader dan masyarakat tentang pemberian makan balita dan anak (PMBA)
4. Pemberian PMT pada balita dengan wasting, obat cacing pada balita, pemberian suplemen gizi, pemanfaatan pangan local
5. Pemantauan tumbuh kembang balita dan penggunaan buku KIA
6. Penanganan adekuat pada balita dengan penyakit dan jaminan kesehatan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* *working plant*. Rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin tidak akan jauh dengan tahun tahun sebelumnya, karena dinas kesehatan melakukan perencanaan berpedoman pada tugas dan fungsi yaitu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan.

Dalam upaya penanggulangan masalah-masalah kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin merencanakan program-program yang mengutamakan kegiatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan tidak mengurangi upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, dan perbaikan status gizi serta penanggulangan kasus gizi buruk (termasuk kegiatan surveilans dan kewaspadaan dini), promosi kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana, dan pembangunan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin
(TC - 30)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke--				Proyeksi		Catatan analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	
1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,3%	84,8%	86%	84,89%	100%	100%	Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan sehingga standar pelayanan ANC tidak terpenuhi, akses yang sulit, SDM terbatas dan tidak merata
2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73,6%	73,6%	91%	71,62%	100%	100%	Akses pelayanan kesehatan yang sulit, terbatasnya SDM
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,8%	90,6%	90%	80,93%	100%	100%	Kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan seperti Puskesmas rantau Suli, Muara Madras dan Muara Kibul
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,7%	88,4%	89%	86,51%	100%	100%	Akses layanan yang sulit dijangkau, pemanfaatan posyandu belum optimal, kurangnya kesadaran ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, beberapa posyandu belum memiliki saera dan prasarana yang lengkap sesuai standar, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,0%	92,4%	96%	95,46%	100%	100%	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit atau izin

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

6	Cakupan pelayanan kesehatan Pada usia produktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,9%	74,4%	77%	77,48%	100%	100%	BHP medis yang tidak sesuai dengan usia rodutif, beberapa Pemanfaatan posbindu PTM belum maksimal
7	Cakupan pelayanan kesehatan Usia lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,6%	99,5%	100%	87,52%	100%	100%	Tidak semua desa mempunyai posyandu usila sehingga berpengaruh pada cakupan pelayanan usila
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	74,8%	76%	76,69%	100%	100%	BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprodutif, Ada beberapa posbindu PTM yang belum aktif dalam memberikan layanan kesehatan
9	Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (DM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,3%	98,4%	90%	98,95%	100%	100%	BHP medis yang disediakan tidak sesuai dengan usia reprodutif
10	Cakupan pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,1%	98%	98%	98,88%	100%	100%	Masih ada masyarakat yang tidak mau memeriksakan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa karena di anggap aib di masyarakat
11	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66%	79%	93%	95%	100%	100%	Masyarakat masih ada yang tidak mau rutin minum obat TB secara teratur
12	Cakupan pelayanan kesehatan yang terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,3%	55,4%	68%	57,02%	100%	100%	Masih adanya masyarakat yang tida mau melakukan skrining

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Merangin tahun 2024 UHH (Usia Harapan Hidup) meningkat menjadi 71,95 dari 71,64 di tahun 2023. Ini berbanding lurus dengan pencapaian SPM Dinas Kesehatan pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan capaian dibanding tahun 2023 (Tabel 2.2).

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Dari tabel 2.2 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian terendah ada pada pelayanan kesehatan yang terkena HIV yang hanya mencapai 68% capaian dari target 100%. Rendahnya capaian tersebut bukan dikarenakan upaya pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak optimal tetapi dikarenakan adanya pergantian aplikasi SIHA, aplikasi ini adalah tolak ukur dalam pengumpulan data pelayanan HIV yang ada di daerah, namun dikarenakan adanya update Aplikasi baru menyebabkan data yang diinput tidak masuk secara maksimal, sehingga menyebabkan capaian menjadi rendah. Capaian Pelayanan kesehatan yang terendah selanjutnya adalah Pelayanan Kesehatan Hipertensi. upaya yang dilakukan pada kegiatan hipertensi untuk mencapai target yaitu dengan membentuk dan mengaktifkan POSBINDU PTM, melakukan pemeriksaan dan monitoring Tekanan Darah, Edukasi untuk perubahan gaya hidup (Diet seimbang, istirahat cukup, aktifitas fisik dan kelola stress) dan pengelolaan farmakologis untuk penderita hipertensi.

- ❖ Pelayanan skrining diberikan sesuai kewenangannya oleh (doker, bidan perawat, nutrisisionis atau petugas pelaksana posbindu PTM terlatih) dilakukan dipuskesmas dan jaringanya (posbindu PTM) minimal 1 tahun sekali.

- ❖ Pelayanan skrining meliputi: Deteksi kemungkinan (obesitas, hipertensi, DM, kanker, gangguan mental emosional dan perilaku), pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Trend Kasus kematian ibu di Kabupaten Merangin tidak terjadi penurunan yang signifikan, jika dilihat dari data kejadian kasus kematian ibu pada Tahun 2022 terdapat 6 kasus kematian ibu, tahun 2023 adalah 5 kasus kematian ibu dan di tahun 2024, ada 5 kasus kematian ibu, tidak ada terjadi penurunan kasus kematian ibu pada tahun 2024 dibandingkan dengan data di tahun 2023. Begitu juga dengan kematian neonatal terjadi peningkatan kasus kematian tahun 2022 yaitu 23 kasus kematian neonatal, tahun 2023 yaitu 30 kasus kematian neonatal dan di tahun 2024 yaitu 33 kasus kematian neonatal

Masih rendahnya ibu hamil hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan merut standar di kabuapeten Merangin Tahun 2024 yaitu Capaian Ante natal care (ANC) K4 77,08% dan ANC K6 pencapaian 62,9%, ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (persalinan difalitas kesehatan) 71,6% dari target 100% juga merupakan salah satu factor penyebab kasus kematian ibu dan neonatal belum turun secara signifikan dan fluctuation.

Hasi survey SSGBI di tahun 2022 menjadi 14,5% dan di tahun 2024 dari hasil survei SKI mengalami peningkatan presentase stunting 0,4% menjadi prevalensi stunting 14,9% Target penurunan stunting Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah 11% dan tahun 2024 dengan target 9%, sedangkan target prevalensi stunting nasional 14%, pentingnya penigkatan koordinasi konvergensi yang lebih optimal dalam intervensi spesifik dan sensitive pencegahan stunting untuk pencapaian target yang di tetapkan.

Wasting dan *stunting* adalah masalah gizi yang saling terkait, dimana kedua bentuk masalah gizi ini memiliki faktor risiko yang sama dan saling memperburuk kondisi satu dan lainnya. Selain risiko kematian yang tinggi, anak *wasting* yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi *stunting* dan anak *stunting* berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi *wasting* dibandingkan dengan anak gizi baik. Risiko kematian akan meningkat jika anak mengalami dua permasalahan gizi (*wasting* dan *stunting*) secara bersamaan. Untuk kasus *wasting* balita di Kabupaten Merangin tahun tahun 2022 persentase *wasting* 1,52% dan di tahun 2023 adalah 2,20 % dan pada tahun 2024 kasus *wasting* 2,20% tidak terjadi penurunan persentase *wasting*

dari tahun sebelumnya tetapi peningkatan persentase wasting di Kabupaten Merangin masih dibawah prevalensi nasional target 2,5%

❖ **Hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah**

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana parsarana penunjang pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan fasilitas rujukan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan komplikasi maternal dan neonatal upaya penurunan AKI dan AKB sesuai dengan standar di fasilitas kesehatan.
2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, penguatan koordinasi partisipasi lintas sektor terkait mendukung penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak
3. Belum optimalnya ketersediaan darah pada PMI Kabupaten dan UTDRS RS untuk kegawatdaruratan ibu melahirkan, Salah satu penyebab dari kematian ibu melahirkan adalah perdarahan. Untuk mencegah kematian ibu, diperlukan akses terhadap pelayanan darah yang cukup. Hal ini dapat dicapai jika banyak donor darah sukarela yang secara rutin mendonorkan darahnya, sehingga unit transfusi darah (UTD) dapat memenuhi permintaan darah dari fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, pihak swasta, lembaga masyarakat, organisasi profesi dalam intervensi spesifik dan sensitive pencegahan stunting.
5. Kurangnya Pengetahuan masyarakat, social ekonomi, akses geografis, kesehatan lingkungan
6. Belum semua masyarakat memiliki Jaminan kesehatan

❖ **Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Terhadap capaian program nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs**

1. Membantu pemerintah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan
2. Membantu pemerintah Kabupaten Merangin untuk Meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
3. Membantu Pemerintah Pusat Melalui Pemerintahan Daerah dalam Pemenuhan Indikator SPM Bidang Kesehatan.
4. Adanya Sinkronisasi penganggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk pendanaan melalui APBD dan DAK.

- ❖ Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah, sebagai berikut :

1. Tantangan

- Belum semua masyarakat terjamin pembiayaan kesehatannya
- Letak geografis serta kondisi transportasi yang sulit menghambat pelayanan kesehatan
- Luasnya Wilayah Kerja Puskesmas membuat rentang kendali pelayanan kesehatan yang lambat.
- Masih tingginya kepercayaan masyarakat untuk berobat / melahirkan pada pelayanan non nakes
- Sarana dan Prasarana kesehatan yang tidak memadai dan memenuhi standar.
- Prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah

2. Peluang

- Adanya dukungan anggaran dari APBN/DAK dan Provinsi untuk pembangunan kesehatan.
- Dukungan Pembiayaan Melalui Dana Desa
- Adanya Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten dalam pembangunan kesehatan
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang optimal.
- Dukungan akses pelayanan kesehatan swasta yang optimal
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya

pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga.

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas kesehatan mempunyai fungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat serta pengembangan sumber daya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan telah berhasil dicapai beberapa indikator kinerja, namun masih ditemukan adanya beberapa permasalahan spesifik.

Pembangunan bidang kesehatan terutama diarahkan untuk pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada seluruh masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemberi pelayanan dalam hal ini Dinas Kesehatan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan Kabupaten Merangin yang akan dihadapi. Berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin keadaan 31 Desember 2024 berjumlah 1648 orang yang terdiri dari 752 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), 674 orang berstatus tenaga kontrak daerah (TKD) dan PPPK berjumlah 222 orang. Untuk lebih jelasnya keadaan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3

Jumlah Pegawai Tetap (CPNS/PNS), PPPK, Honor Daerah dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Keadaan Bulan Desember 2024

No	Jenis Pendidikan	Jenis Kepegawaian			Total	%
		PNS	TKD	PPPK		
1	Dokter Umum	41	15	6	62	3,76
2	Dokter Gigi	12	0	1	13	0,78
3	Farmasi/S1/Apt	20	15	33	68	4,12
4	Perawat	135	163	56	354	21,48
5	Bidan	297	407	35	739	44,84
6	Kesmas/S2 Kesmas	96	28	36	160	9,70
7	Perawat Gigi	12	3	12	27	1,63
8	Gizi	7	5	15	27	1,63
9	Sanitasi	16	9	9	34	2,06
10	Teknis Medik	31	5	0	36	2,18
11	LCPK	2	0	0	2	0,12
12	Non Kesehatan/CS Puskesmas	60	5	2	67	4,06
13	Analisis Kesehatan	8	6	17	31	1,88
14	SMA Sederajat	15	13	0	28	1,69
	Jumlah	752	674	222	1648	100

2. Sarana dan prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan akan lebih baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang representatif. Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut, akan tergantung pada uraian jabatan, jumlah jabatan struktural dan fungsional, jumlah pegawai, dan kemampuan keuangan. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Bupati Merangin dalam manajemen Kesehatan daerah, Sarana dan Prasarana yang diperlukan akan dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menunjang kegiatan administrasi kesehatan.

Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara pelayanan kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu klinik, Rumah Bersalin, praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan, praktek perawat dan Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan Sarana dan prasarana tersebut diharapkan pelayanan kesehatan dasar juga berdampak baik bagi masyarakat. Adapun Sarana dan Prasarana di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4

**Sarana Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Merangin Tahun 2022, 2023, 2024**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	2022	2023	2024
1	Rs Pemerintah (RSUD)	1	1	1
2	Rs Swasta	3	3	3
3	Puskesmas tanpa perawatan	12	11	11
4	Puskesmas dengan perawatan	15	16	16
5	Puskesmas Mampu PONED	12	13	13
6	Puskesmas Keliling	23	27	27
7	Puskesmas Pembantu	85	84	84
8	Laboratorium Kesehatan Daerah	1	1	1
9	Laboratorium Swasta	1	1	1
10	Praktek Dokter umum	64	76	21
11	Praktek Dokter Gigi	10	14	6
12	Praktek Bidan Mandiri	23	34	13
13	Praktek Pengobatan Tradisional	1230	1169	1150
14	Klinik Pratama	14	19	18
15	Klinik Utama	2	2	2
16	Apotek	56	64	70

bidang Yankes 2024

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Review terhadap rancangan awal RKPD dijabarkan dalam uraian tabel berikut:

Tabel 2. 5

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota Merangin**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL MUTU	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	-	-	-	
			PUSKESMAS TERAKREDITASI MINIMAL MADYA	27	-			-	-		
			Indikator Nasional Mutu	69%	107.204.570.672					51.444.700.000	
			Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC	90%							
			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	98%							
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	92%							
			Puskesmas yang Melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)	55%							

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Proporsi Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	70 %	2816060000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Proporsi Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar		21.800.600.000	
1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1.896.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		896.000.000	
1.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	560.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		560.000.000	
1.1.3	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	2.000.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		-	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1.4	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	14 Unit	6.933.740.000	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		6.918.740.000	
1.1.5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	1.041.300.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1.041.300.000	
1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	3 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		-	
1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	14 Unit	1.097.060.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		1.097.060.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	22 Unit	2.240.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.240.000.000	
1.1.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	15 Unit	560.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		560.000.000	
1.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1.11	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	14 Unit	100.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		100.000.000	
1.1.12	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	380 Paket	6.250.000.000	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan		6.250.000.000	
1.1.13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	420 Unit	950.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		950.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1.14	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	332 Kali	347.500.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		262.500.000	
1.1.15	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Dinas Kesehatan	Jumlah pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan kesehatan berbasis telemedicine) yang dilakukan pengembangan	12 Layanan	200.000.000	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Dinas Kesehatan	Jumlah pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan kesehatan berbasis telemedicine) yang dilakukan pengembangan		200.000.000	
1.1.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	106200 Keluarga	985.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		175.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.1.17	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2 Unit	550.000.000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		550.000.000	
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	18.506.801.672	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan		1.877.300.000	
1.2.1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1.250.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		-	
1.2.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen	15.830.401.672	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.100.900.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.2.3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	490.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		390.000.000	
1.2.4	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	136.400.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		136.400.000	
1.2.5	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	250.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		250.000.000	
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan	Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN	86 %	310.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan	Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN		180.000.000	
1.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	310.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		180.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi Izin	89 %	445.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi Izin		445.000.000	
1.4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	29 Unit	210.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		210.000.000	
1.4.2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	235.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		235.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC	90 %	37.868.540.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC		20.552.900.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	82 %	37.868.540.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan		20.552.900.000	
1.5.1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	37.868.540.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		20.552.900.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	98 %	6.225.500.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		1.926.000.000	
1.6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	6.225.500.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan		1.926.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.6.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5799 Orang	372.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		170.000.000	
1.6.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7477 Orang	250.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		75.000.000	
1.6.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	100.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.6.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	84.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		30.000.000	
1.6.5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	444.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		174.000.000	
1.6.6	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	3.620.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		920.000.000	
1.6.7	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	26 spesimen	122.500.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		28.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.6.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1074 Orang	577.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		307.000.000	
1.6.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	131.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		50.000.000	
1.6.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5606 Orang	524.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Dinas Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		200.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	92 %	2.612.500.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		838.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	2.612.500.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan		838.500.000	
1.7.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67112 Orang	503.537.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		233.537.500	
1.7.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3450 Orang	521.462.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		251.462.500	
1.7.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	543 Orang	558.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		180.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.7.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14396 Orang	289.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		73.500.000	
1.7.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang	370.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		100.000.000	
1.7.6	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1100 Orang	370.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang Melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)	55 %	12.993.900.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Puskesmas yang Melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)		3.824.400.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	100 %	12.993.900.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan		3.824.400.000	
1.8.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6708 Orang	2.207.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		317.400.000	
1.8.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6424 Orang	665.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		260.000.000	
1.8.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5852 Orang	405.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		135.000.000	
1.8.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30321 Orang	420.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		150.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.8.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77580 Orang	278.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		170.000.000	
1.8.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	285075 Orang	464.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		113.000.000	
1.8.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26405 Orang	810.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		135.000.000	
1.8.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	2.875.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		850.000.000	
1.8.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	440.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		305.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.8.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	1.005.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		330.000.000	
1.8.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	823.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		283.000.000	
1.8.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	302.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		32.000.000	
1.8.13	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		250.000.000	
1.8.14	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Dokumen	89.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		89.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
1.8.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	3 Dokumen	259.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		30.000.000	
1.8.16	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		25.000.000	
1.8.17	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	8 Dokumen	725.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak		50.000.000	
1.8.18	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Layanan imunisasi	12 Dokumen	800.000.000	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Layanan imunisasi		260.000.000	
1.8.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Haji	2 Dokumen	121.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Haji		40.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap Populasi	40 %	1.903.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap Populasi		1.903.500.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik	72 %	128.500.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik		28.500.000	
2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	128.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		28.500.000	
2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Rencana Kebutuhan di Fasilitas Kesehatan	30 %	40.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Rencana Kebutuhan di Fasilitas Kesehatan		40.000.000	
2.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	40.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		40.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase SDM yang mengikuti Uji Kompetensi	15 %	1.735.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase SDM yang mengikuti Uji Kompetensi		1.835.000.000	
2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	220 orang	1.735.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		1.835.000.000	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	PERSENTASE FASILITAS KEFARMASIAN YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN	64 %	383.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	PERSENTASE FASILITAS KEFARMASIAN YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN		383.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	60 %	57.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan		57.000.000	
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	57.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		57.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mendapatkan SPP-IRT	60 %	143.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mendapatkan SPP-IRT		143.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	143.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		143.000.000	
3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Persentase Sarana Produksi dan Produk Pangan IRT yang memenuhi ketentuan	100 %	183.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Persentase Sarana Produksi dan Produk Pangan IRT yang memenuhi ketentuan		183.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
3.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	62 Sarana	183.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		183.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Presentase Penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup Sehat	64 %	735.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Presentase Penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup Sehat		330.000.000	
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kecamatan yang memiliki Kebijakan Meningkatkan Germas	85 %	420.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kecamatan yang memiliki Kebijakan Meningkatkan Germas		150.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	420.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		150.000.000	
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Promosi Kesehatan	24 kec	115.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Promosi Kesehatan		115.000.000	
4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	115.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		115.000.000	
4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Posyandu Aktif	35 %	200.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Kecamatan dengan Posyandu Aktif		65.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	200.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		65.000.000,00	
5	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Nilai AKIP SKPD	A	145.986.051.323	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Nilai AKIP SKPD		92.899.390.783	
		Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99 %	39.739.353.986		Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		1.976.352.317	
	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Nilai AKIP SKPD	A	145.986.051.323	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Nilai AKIP SKPD		92.899.390.783	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	243.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		208.000.000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		22.000.000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		22.000.000	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		23.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	19.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		19.500.000	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	19.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		19.500.000	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	13.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		13.000.000	
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	24.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.000.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	30.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		25.000.000	
5.1.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		17.500.000	
5.1.10	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Dinas Kesehatan	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Subtansi	10.000.000	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Dinas Kesehatan	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu		7.500.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.1.11	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Dinas Kesehatan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara	40.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Dinas Kesehatan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan		15.000.000	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan	100 %	145.743.051.323	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan		92.691.390.783	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1470 Orang	145.418.051.323	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		92.453.890.783	
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	240.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		200.000.000	
5.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		15.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11.250.000	
5.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kesehatan		4 Laporan	20.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kesehatan				
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		11.250.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	99 %	39.739.353.986	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		1.976.352.317	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	132.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		71.250.000	
5.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD		11.250.000	
5.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	1 Laporan	17.500.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD		11.250.000	
5.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	25.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		11.250.000	
5.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	75.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		37.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	12.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		7.500.000	
5.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		7500000	
5.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	339.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		58.500.000	
5.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	69.750.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
5.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	80.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		17.250.000	
5.5.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		7.500.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.5.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		3.750.000	
5.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15.000.000	
5.5.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	35.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		5.000.000	
5.5.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	65.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10.000.000	
5.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	834.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		388.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		18.750.000	
5.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		70.500.000	
5.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			
5.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		26.250.000	
5.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.750.000	
5.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.750.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.6.7	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kesehatan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kesehatan	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan		22.500.000	
5.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.500.000	
5.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000	
5.6.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	95.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		26.000.000	
5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	369.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		147.500.000	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.7.1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Paket	14.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
5.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
5.7.3	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	230.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		97.500.000	
5.7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan		50.000.000	
5.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	693.602.317	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		763.602.317	
5.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	453.602.317	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		423.602.317	

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		340.000.000	
5.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	595.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		370.000.000	
5.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100.000.000	
5.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		150.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	10	-11	-12
5.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10.000.000	
5.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	210.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		110.000.000	
5.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Cakupan Pelayanan BLUD	96 %	36.763.001.669	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Cakupan Pelayanan BLUD		170.000.000	
5.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit	36.763.001.669	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		170.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi Dinas Kesehatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Setelah usulan yang telah didapat melalui Musrenbang Kecamatan selanjutnya usulan dianalisa dan disesuaikan dengan juknis dan data lapangan yang ada, kemudian Dinas Kesehatan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Merangin yang dihadiri pemangku kepentingan dan hasil forum tersebut menyepakati:

1. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten
2. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah dari 106 usulan kecamatan Dinas Kesehatan Menerima 49 usulan, menolak 57 usulan.
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan Reses DPRD dari 15 usulan kecamatan Dinas Kesehatan Menerima 11 usulan, menolak 4 usulan.

Tabel 2.6

**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Merangin Jambi**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					10.379.622.998
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia			
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Pustu Sungai Nilau	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		444.123.000,-
2	Pengembangan Puskesmas	- Puskesmas Pasar Masurai - Pembangunan Aula Puskesmas Rantau Suli - Lanjutan Pembangunan Pagar Puskesmas Pasar Masurai - Tower Beton Toren air Sungai Manau	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit		9.485.959.998,-
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Pustu Desa Koto baru - Pustu Desa Pelakar Jaya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		449.540.000,-

Dari tabel di atas dapat di jelaskan kegiatan pada TA. 2026, Rehab/pembangunan yang dilaksanakan sesuai dari data dukung bahwa di beberapa puskesmas dan pustu yang sudah tidak layak untuk melaksanakan pelayanan maka itu perlu dilakukan rehab fisik dan pembangunan agar dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Usulan dari hasil Musrenbang tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan ada beberapa usulan tidak dapat dilaksanakan untuk TA 2026, karena :

1. Beberapa usulan tersebut telah masuk dalam usulan yang dilaksanakan pada TA. 2026 diantaranya :
 - a) Pembangunan Pagar Puskesmas Muara Kibul
2. Beberapa usulan dalam pemenuhan alat kesehatan, Pustu dan Polindes akan diusulkan melalui dana desa.
 - a) Pembangunan Posyandu Desa Sungai Ulak
3. Beberapa usulan alat kesehatan diusulkan melalui program SHOPI Puskesmas
 - a) Pustu Desa Mampun Baru
4. Beberapa usulan diusulkan rehabilitasi melalui DAK FISIK:
 - a) Penambahan ruang IGD Puskesmas Kederasan Panjang
 - b) Rehab Gedung Puskesmas Kederasan Panjang
5. Beberapa usulan bukan termasuk dalam ruang lingkup tupoksi dari Dinas Kesehatan , seperti :
 - a) Bantuan Pembangunan Gapura dan Tempat Parkir Puskesmas Kederasan Panjang
 - b) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Medis Maupun Non Medis TPS untuk Puskesmas Tabir Barat dan Puskesmas Tabir Ulu
 - c) Pembuatan Paping Blok Puskesmas Kederasan Panjang Untuk Mencegah Tingginya Intensitas Hujan Menyebabkan Kan Genangan Air Dihalaman Puskesmas

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” maka telah ditetapkan 8 (delapan) Misi Presiden 2025-2029, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2025-2029, menjadi misi Kementrian Kesehatan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh, dengan target menurunkan angka stunting dan meningkatkan kemandirian produk farmasi.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2025-2045, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Selanjutnya, Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, Komitmen tersebut didasari atas Visi Presiden yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, terdiri atas 6 Pilar transformasi penopang kesehatan indonesia :

1. Transformasi Layanan Primer

Transformasi Layanan Primer adalah pelayanan kesehatan yang difokuskan ke arah pencegahan, Transformasi ini adanya di Puskesmas dan Posyandu , terdiri atas :

- a. Edukasi Penduduk
- b. Pencegahan Primer
- c. Pencegahan Sekunder
- d. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Layanan Primer

2. Transformasi Layanan Rujukan

Transformasi Layanan Rujukan bertujuan meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier sehingga terbitnya pemerataan pelayanan

kesehatan diseluruh Indonesia, Transformasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembungan Rumah Sakit di Kawasan Timur, Jejaring Pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan *World's top healthcare centers*.

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Transformasi Sistem Kesehatan bertujuan meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan (produksi hingga distribusi farmalkes yang lancar), serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.

4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan yaitu tersedia, cukup dan berkelanjutan ; alokasi yang adil dan pemanfaatan yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kuirang mampu.

5. Transformasi SDM Kesehatan

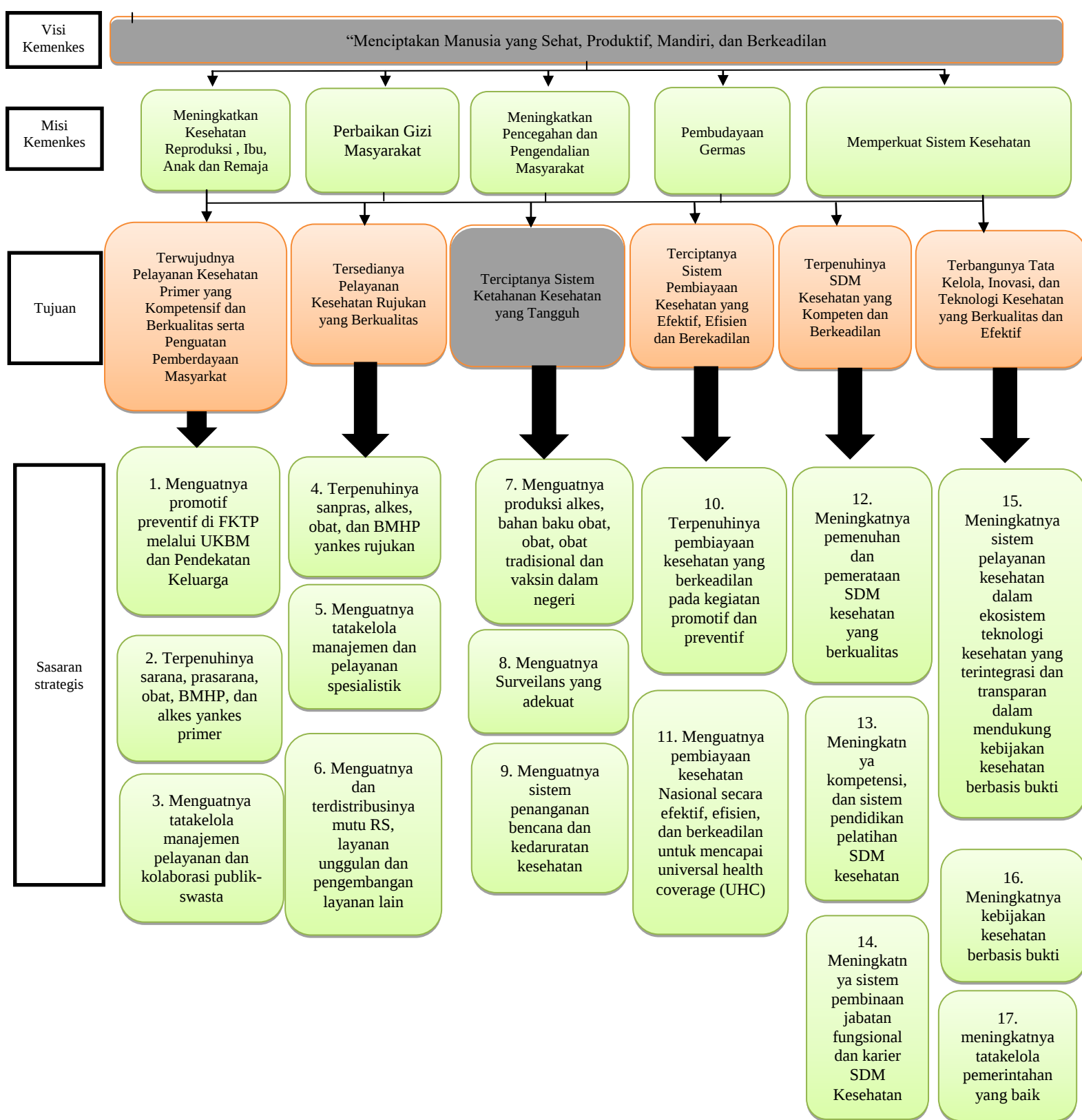
Trasformasi SDM Kesehatan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata di seluruh Indonesia, dengan dilakukan penambahan kuota mahasiswa beasiswa dalam & luar negeri,

6. Transformasi teknologi kesehatan

Transformasi teknologi kesehatan berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Berdasarkan 6 Pilar Transformasi tersebut Kementrian Kesehatan Menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran strategis Kementrian Kesehatan seperti pada bagan berikut ini :

Gambar 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kemenkes



Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari 17 indikator yang kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
5. Prevalensi stunting pada balita (%)
6. Prevalensi wasting pada balita (%)
7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
14. Persentase RS terakreditasi (%)
15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

A. TUJUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, oleh Pemerintah Kabupaten/kota beserta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari

Program Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Strategis merupakan suatu tatanan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan memperhitungkan dinamika perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan antara lain seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin 2025-2029 dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian akan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa perencanaan kesehatan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas bidang kesehatan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dan sasaran sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun.

B. SASARAN STRATEGIS

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin sampai dengan akhir tahun 2029 adalah:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat Kabupaten Merangin
2. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit
4. Meningkatnya Jumlah, Jenis, kualitas dan pemerataan sumber daya kesehatan
5. Meningkatnya Ketersediaan serta mutu Kefarmasian dan alat kesehatan
6. Meningkatnya tata kelola perencanaan, keuangan, dan asset.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, maka arah kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
2. Mewujudkan kondisi kesehatan lingkungan penduduk yang lebih baik agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang berasal dari lingkungan
3. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB
5. Peningkatan infrastruktur kesehatan terutama untuk pedesaan dan wilayah terpencil

6. Peningkatan kualitas puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya
7. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
9. Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat penduduk miskin
10. Pengembangan dan penguatan jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini
11. Melakukan analisis jumlah kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas (sesuai permenkes nomor 75 tahun 2014)
12. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi
13. Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

Tabel 3.1

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KABUPATEN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase pemerataan dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum melalui:				
		1. Persentase pemetaan kelas fasilitas kesehatan	%	61,11	65	65
		2. Jumlah peningkatan puskesmas dengan kelas utama	PKM	12	8	1
		3. Jumlah peningkatan puskesmas rawat inap	PKM	16	17	17
		4. Persentase indeks kepuasan masyarakat	%	80	80	80
		Persentase peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan melalui peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai	%	51,8	65	65

		dengan kebutuhan				
		Persentase peningkatan promosi kesehatan	%	80	80	80
		Jumlah peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan diantaranya adalah inovasi home care	%	80	80	80
2	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	AKI (per 100.000 KH)	KH	51/100.000	98/100.000	91,79/100.000
		AKB (per 1.000 KH)	KH	9,09/100.000	8,99/100.000	6,43/100.000
		Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH)	KH	3,42	6,27/100.000	6,43/100.000
		Prevalensi stunting pada balita	%	9	12	10
		Prevalensi wasting pada balita	%	4,10	7	6,9
3	Penurunan Kematian Ibu dan Kematian Bayi	Persentase persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	%	85,16	87,16	88
		Cakupan kunjungan antenatal (%)	%	95	95	95
		Cakupan kunjungan neonatal (%)	%	95	95	95
4	Penurunan Stunting	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	60	60	60
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	%	10	10	10
		Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	85	85	85
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada Balita	%	4,10	7,00	6,90
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi	Puskesmas	27	27	27
	Meningkatkan Kompetensi SDM, Sarana	Ketersediaan alat kesehatan di fasyankes sesuai standar	%	100	100	100
		Sarana Kefarmasian sesuai standar	%	65	68	70

	kefarmasian sesuai standar dan informasi yang terintegrasi	SDMK di Fasyankes sesuai standar	%	80	80	80
		Presentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	60	65	65
		Presentase puskesmas tanpa dokter	%	0	0	0
		Puskesmas yang melaksanakan E-Puskesmas	%	100	100	100
4	meningkatkan pengendalian dan penanganan penyakit	Pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular	%	100	100	100
		Prevalensi obesitas pada penduduk umur 18 tahun	%	21,9	21,9	21,9

Upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu ditetapkan beberapa kebijakan yang terdiri dari:

1. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
2. Pendampingan pelayanan gizi masyarakat
3. Pendampingan pelayanan kesehatan ibu
4. Pendampingan pelayanan kesehatan anak
5. Meningkatkan Standarisasi pelayanan kesehatan
6. Penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat
7. Penyelenggaraan pembinaan pengobatan tradisional (BATRA)
8. Penyelenggaraan Kartu Merangin Sehat (KMS)
9. Meningkatkan Jumlah Desa Siaga aktif strata mandiri
10. Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan
11. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Ketentuan

3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan penambahan atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran dimuali dengan Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah masing-masing, maka dari hasil pemetaan tersebut didapatkan rancangan program dan kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Merangin tahun 2026 sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini mendukung misi Kepala Daerah. Dalam Program ini mencakup beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai Berikut :

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini meliputi penyusunan dan penyusunan Anggaran serta Penyusunan Evaluasi Kegiatan Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Perencanaan OPD secara optimal. Yang transparan berbasis *e-planning*, *e-budget* dan *e-audit* yang kemudian akan dilakukan melalui Sistem Intern Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya :

- a) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dokumen perencanaan, yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang terdiri empat Dokumen yang diantaranya Rancangan Renja, Renja Awal, Renja

Akhir dan Renja. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) untuk Tahun 2026 adalah Renstra Tahun 2025-2029. Forum Perangkat Daerah bidang kesehatan dengan Output adalah rancangan RKPD tahun 2026, sebagai penyempurnaan dari rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan tahun 2026 yang telah disusun. Sehingga ada sinkronisasi dengan usulan dari desa dan kecamatan. Selain itu dalam Sub kegiatan ini mencakup penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan IKU, IKK.

b) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Penyusunan Rencana Kerja OPD yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

c) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah disahkan oleh Tim TAPD yang ada di Daerah.

d) Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini merupakan gabungan dari beberapa kegiatan diantaranya Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SPIP). Penyusunan standar penilaian sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Laporan tahunan merupakan Laporan dari hasil seluruh kegiatan tahun 2024 yang dituangkan berdasarkan data dan di analisa yang kemudian menjadi dasar untuk membuat rencana kegiatan tahun selanjutnya.

- e) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Adapun tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD adalah termonitornya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja dinas kesehatan kab. Merangin. Lingkup kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja diantaranya adalah AKIP dan rencana Aksi.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan rangkuman dari kegiatan penyelenggaraan seluruh administrasi yang berkaitan dengan keuangan perangkat daerah, sub kegiatan nya meliputi :

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Subkegiatan ini berisikan Penyediaan Gaji Pokok dan Tunjangan-tunjangan ASN yang diberikan selama 12 Bulan (1 Tahun)

- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan OPD dinas kesehatan yang disusun pada akhir tahun berjalan, dimana dalam penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau realisasi keuangan Dinas Kesehatan dalam satu tahun.

- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan ini berisikan kegiatan Penyusunan laporan keuangan OPD dinas kesehatan yang disusun setiap Bulan, dimana dalam penyusunan laporan ini dapat dilihat data penyerapan atau realisasi keuangan Dinas Kesehatan.

- d. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini berisi penyediaan jasa administrasi keuangan yang merupakan sarana pendukung kelancaran administrasi keuangan perkantoran. Kegiatannya meliputi Penyediaan Honorarium Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD), Bendahara Umum dan Bendahara KPA.

e. Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan dan penyusunan laporan aset OPD dinas Kesehatan operasional penyusunan pelaporan aset OPD, dan perjalanan dinas dalam daerah untuk penelusuran aset BMD.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan ini mendukung misi Kepala Daerah dalam administrasi dan Operasional Kepegawaian Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dalam pelayanan kesehatan, petugas mempunyai seragam atau pakaian dinas yang digunakan dalam kegiataannya sehari-hari untuk menjalankan tugasnya. Untuk itu diperlukan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diperuntukan untuk dinas kesehatan dan uptd puskesmas, Labkesda dan UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. Selain itu terdapat penyediaan pakaian untuk hut kabupaten merangin yang menggunakan custom atau seragam pakaian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

b) Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di kabupaten merangin. Masih dibutuhkan kebutuhan ketenagaan sesuai dengan permenkes 75 tahun 2014, untuk kebutuhan tenaga honorer tahun 2021. Maka dari itu kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan kepegawaian dan operasional kepegawaian dalam waktu satu tahun.

c) Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

d) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan penyusunan Peraturan-peraturan yang disusun dalam rangka penyusunan Peraturan Baru daerah. Seperti contohnya Penyusunan Peraturann Retrubusi Kesehatan Daerah, penyusunan Peraturan Tentang Kesehatan lainnya

e) Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Kegiatan yang dilaksanakan seperti Pendidikan dan Pelatihan Barang dan Jasa, serta Pelatihan-Pelatihan lainnya

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang Operasional Dinas Kesehatan dalam waktu satu Tahun, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Adapun kegiatannya adalah penambahan KWH di puskesmas dan Perbaikan instalasi listrik di dinas maupun puskesmas.

b) Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya

Dalam era digitalisasi dan komputerisasi, pemerintah kab. Merangin banyak menggunakan aplikasi yang berbasis web untuk kebutuhan penginputan data kesehatan dan anggaran, sehingga dibutuhkan pengadaan komputer / laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Selain itu Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana pendukung alat studio dan komunikasi.

c) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Namun dalam penganggarannya masih sangat kecil dari analisis standar biaya yang diperuntukan untuk atk OPD. Selain itu Penyediaan Alat Kebersihan juga merupakan rincian dalam Sub kegiatan ini.

d) Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan yang menjadi sarana pendukung kelancaran pelayanan perkantoran baik di dinas maupun pelayanan di puskesmas. Sub Kegiatan ini menyediakan Cetak Spanduk untuk Promosi Kesehatan di Puskesmas maupun Spanduk yang berkaitan dengan administrasi dinas Kesehatan.

e) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat kabupaten merangin di butuhkan media promosi kesehatan melalui media massa atau pun percetakan, untuk itu kegiatan penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi menjadi bagian dalam kegiatan rutin yang setiap tahu di anggarkan.

f) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dalam menunjang kegiatan lintas program dan lintas sektor terkait dengan Dinas Kesehatan Kab. Merangin. Dinas Kesehatan Kab. Merangin menganggarkan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun keluar daerah. Selain itu Sub kegiatan ini melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan ke puskesmas, dinas kesehatan melakukan koordinasi dan supervisi ke puskesmas dalam rangka mensinkronkan program dan tujuan sasaran dinas kesehatan kabupaten merangin.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mendukung sarana operasional Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

a) Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dinas Kesehatan mempunyai UPTD Puskesmas, Labkesda dan UPTD Farmasi dan Perbekes sebagai penerus dari pelayanan yang berdampak langsung pada masyarakat, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut maka perlu adanya pengadaan kendaraan dinas dan operasional untuk puskesmas seperti ambulan dan pusling roda dua.

b) Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan dan Di Puskesmas di butuhkan sarana pendukung seperti mebeleur. Untuk itu Dinas Kesehatan kab. Merangin perlu adanya pengadaan mebeleur untuk menunjang pelayanan kesehatan yang ada. Adapun kegiatan dalam ini adalah pengadaan meja, kursi, dan lemari arsip.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Untuk membantu dinas dalam mencapai tujuan dan sasarannya diperlukan anggaran rutin kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang akan membantu kelancaran dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik penyediaan ini menjadi penyediaan yang mutlak harus ada setiap tahunnya untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari selama kurun waktu dari Januari – Desember 2024 (1 tahun). Kegiatannya meliputi Pembayaran rekening telpon dinas kesehatan dan UPTD, pembayaran rekening air Dinas Kesehatan dan UPTD, pembayaran rekening listrik dinas kesehatan dan UPTD dan pembayaran rekening internet dinas kesehatan dan UPTD

b) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam setiap kegiatan atau pun pertemuan yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Merangin, perlu di support dengan adanya penganggaran biaya rutin penyediaan makan dan minum rapat baik untuk koordinasi dengan puskesmas maupun untuk pertemuan dengan kepala bidang maupun seksi-seksi, serta rapat atau pertemuan lintas sektor.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi. Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan meliputi Pembayaran premi asuransi kendaraan Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
- b) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dinas kesehatan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas diperlukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional dalam menunjang pelayanan kesehatan. Selain itu Sub kegiatan ini juga mengakomodir pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas.
- c) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya service pemeliharaan AC, Komputer dan kulkas untuk menunjang pelayanan publik dan kenyamanan petugas dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
- d) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dalam Peningkatan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat baik di Dinas Kesehatan membutuhkan sarana pendukung pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Untuk itu Dinas Kesehatan kab.

Merangin memuatkan pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor untuk menunjang pelayanan kesehatan yang ada. Dalam perhitungan anggaran menggunakan jumlah luas bidang perkantoran dinas kesehatan.

8) Kegiatan Penataan Organisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penataan organisasi. Sub kegiatan dalam kegiatan ini yaitu :

a) Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian pelaksanaan kualitas pelayanan yang ada di Dinas Kesehatan baik dilaksanakan melalui Monitoring, Evaluasi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengendalian kegiatan Evaluasi District Health Account (DHA).

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Dinas Kesehatan dalam hal ini diklasifikasikan dalam Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Urusan pemerintahan bidang kesehatan. Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan mengusulkan Usuran wajib sebanyak 4 (Empat) Program wajib, 14 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Program ini mendukung Upaya Kesehatan dalam bentuk Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan maupun Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara langsung. Program ini terdiri dari empat Kegiatan dan empat puluh lima sub kegiatan seperti yang dijabarkan dibawah ini.

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) harus bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik. Kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan adanya SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, sistem pelayanan dan rujukan. Sehingga penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan kab. Merangin sudah memiliki aplikasi ASPAK untuk pengentryan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan sehingga dapat terintegrasi dalam proses perencanaannya. Dalam kegiatan ini terdapat sub kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan : Pembangunan Puskesmas

Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas diakomodir melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

b) Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pembangunan Fasilitas kesehatan seperti Pustu, Poskesdes dan Polindes yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan yang kemudian di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas Kesehatan. Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu Dana Mandatori Kabupaten.

c) Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Sub Kegiatan ini diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dimana untuk Tahun 2024 sub kegiatan ini beriringan dengan sub kegiatan Pembangunan Puskesmas.

d) Sub Kegiatan : Pengembangan Puskesmas

Tahun 2024 Sub Kegiatan ini masih diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK), beberapa sub kegiatan Pengembangan Puskesmas diantaranya Peningkatan Puskesmas dari Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas Rawat Inap, dimana kegiatannya adalah Pembangunan Gedung Rawat inap Puskesmas.

e) Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas di akomodir dalam Dana Alokasi Khusus dan juga Dana Mandatori Kabupaten. Sub kegiatan ini

meliputi perbaikan- perbaikan beberapa Puskesmas yang sudah menjadi prioritas di Tahun 2024.

f) Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan seperti Pustu, Poskesdes, Polindes, yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan ataupun usulan Reses Dewan yang kemudian di seleksi atau di fokuskan menjadi usulan prioritas Dinas Kesehatan. Sub kegiatan ini di danai melalui Dana Alokasi Umum yaitu Dana Mandatori Kabupaten. Selain itu terdapat Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi dan Sarana Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

g) Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pembuatan Sumur Fasilitas Kesehatan di Desa, dan Sarana Fasilitas lainnya yang di akomodir dari Dana Alokasi Umum (DAU), Mandatory maupun DAK.

h) Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh pengadaan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Pengadaan Puskesmas Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pengadaan Ambulan, dan Pengadaan Prasarana Fasilitas lainnya yang di akomodir dari Dana Alokasi Umum (DAU), Mandatory maupun DAK.

i) Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi baik yang terdapat di Puskesmas maupun Laboratorium Kesehatan Daerah.

j) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan ini mengakomodir Pengadaan Alat Kesehatan seluruh fasilitas kesehatan dan Alat Penunjang lainnya.

k) Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin

Perencanaan obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar (PKD) dibiayai melalui berbagai sumber anggaran. Sehingga, pembentukan tim perencanaan obat terpadu merupakan suatu kebutuhan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi yang terkait dengan masalah obat di setiap kabupaten/kota.

l) Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai

Sub Kegiatan ini adalah bagian dari Pengadaan Obat dan Vaksin dimana sub ini mengakomodir Pengadaan yang bukan termasuk dalam kategori Obat seperti Rapid Test. Dan sumber dana pada sub kegiatan ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK)

m) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sub Kegiatan ini mengakomodir seluruh pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan baik yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan maupun langsung dari usulan Puskesmas melalui Dinas Kesehatan.

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini sejalan dengan misi ketiga kepala daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam pencapaian SDGs. Dalam rangka Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Merangin mempunyai Sub kegiatan sebagai wadah dalam meningkatkan pemenuhan SPM seperti Sub Kegiatan dibawah ini:

a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh rangkaian pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya Koordinasi Lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program, Bimbingan teknis dll yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.

b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sub Kegiatan ini berisikan kegiatan Jaminan Persalinan yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan (tidak bertanggung dalam kepesertaan ASKES, BPJS dan asuransi lainnya).

c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Upaya Kesehatan Anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Upaya ini dikhususkan pada Upaya Kesehatan Bayi baru Lahir. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Sub Kegiatan ini berisikan seluruh pengelolaan

pelayanan kesehatan Ibu hamil, kegiatan diantaranya Koordinasi Lintas sektor, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Program, Bimbingan teknis dll yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir.

d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: 1) Pelayanan kesehatan balita sehat. 2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Sub kegiatan ini mengakomodir pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan. Pelayanan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan b) Melakukan rujukan jika diperlukan c) Memberikan penyuluhan kesehatan.

f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai

standar meliputi: 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi : 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular

h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada - 98 - seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: b) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan c) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat d) Melakukan rujukan jika diperlukan

i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota - 105 - mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Edukasi

- perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c) Melakukan rujukan jika diperlukan
- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; 2) Edukasi
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi: 1) Pemeriksaan klinis 2) Pemeriksaan penunjang 3) Edukasi
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Sub kegiatan ini mengakomodir Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko 2) Skrining Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu: 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS

- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual) 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.
- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan; Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi: a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan yaitu bayi dan balita, Remaja perempuan dan Ibu hamil dan ibu menyusui. Sedangkan Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan kekurangan energi protein (KEP), anemia zat besi, gangguan akibat kekurangan zat yodium dan kekurangan vitamin A. Dinas Kesehatan melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik, termasuk dalam pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan penanggulangan gizi buruk dengan mendirikan pusat atau unit pemulihan gizi.

o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan sehingga sangat dibutuhkan pembinaan dalam rangka penyuluhan pada masyarakat.

p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Sasaran bidang kesehatan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan yaitu meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan beberapa indikator yang harus di capai yaitu Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan STBM, sarana air minum yang dilakukan pengawasan, tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan, tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat, dll.

q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

r) **Pengelolaan Surveilans Kesehatan**

Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan penanggulangan secara efektif dan efisien sehingga penanggulangan krisis kesehatan akibat wabah atau bencana dapat segera ditemukan akar penyebab masalahnya.

s) **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan: a) menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa; b) menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; c) memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia; d) memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ; e) menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa; f) meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan g) memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

t) **Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah**

Sasaran dari Sub kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan NAPZA di fasyankes.

u) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Sub kegiatan ini mengakomodir kegiatan Kesehatan Khusus seperti Pelayanan pada Kesehatan Jamaah Haji baik kesehatan fisik mental jamaah tersebut sampai pelayanan imunisasi jamaah haji.

v) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas kesehatan bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, obat, dan vaksin dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

Langkah - Langkah kebijakan dan strategi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam mencapai target indikator adalah : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat sehingga dapat terhindar dari faktor risiko, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui penguatan sumber daya , dan standardisasi pelayanan, Meningkatkan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait, Menyelenggarakan Surveilans dengan mengintegrasikan dalam sistem surveilans penyakit tidak menular di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan masyarakat sehingga dengan kegiatan upaya pembinaan penyakit tidak menular dapat menekan jumlah kematian akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus.

w) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi BPJS puskesmas, pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, dan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan NON PNS.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a) pembayaran jasa pelayanan kesehatan; b) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Sedangkan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan NON PNS sesuai dengan pengadaan perbub bupati nomor 84 tahun 2018 tentang tenaga kontrak untuk ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam lingkup, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

x) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Telemedicine atau konsultasi online didefinisikan oleh American Academy of Family Physicians sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Menurut WHO, praktik telemedicine bisa dibedakan menjadi dua, yakni asinkronis dan sinkronis. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi online. Dengan telemedicine asinkronis, data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter. Lalu dokter mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis. Sedangkan telemedicine sinkronis dilakukan dengan cara interaktif secara langsung, misalnya lewat video call. Jadi baik dokter maupun pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke dokter untuk dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi online. HO menjelaskan ada empat elemen yang berkaitan erat dengan telemedicine, yakni: 1) Bertujuan memberikan dukungan klinis 2) Berguna untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak 3) Melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi 4) Bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Penyediaan telemedisine diakomodir dari Dana Alokasi Khusus.

y) Operasional Pelayanan Puskesmas

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh Operasional Puskesmas dalam jangka satu Tahun. Sumber dana pada sub kegiatan ini terdiri dari 3 sumber dana yaitu 1) Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari retribusi pelayanan Puskesmas yang kemudian digunakan menjadi dua bagian yaitu penggunaan untuk Jasa pelayanan kesehatan dan Operasional Puskesmas seperti pemeliharaan Puskesmas keliling dan atau pemeliharaan gedung bangunan Puskesmas yang tertuang dalam peraturan daerah. 2) Dana alokasu Umum (DAU) yang berisikan jasa jaga rawat inap untuk Puskesmas Rawat Inap. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang berisikan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat sesuai dengan Juknisnya.

z) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sub Kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan UPTD Farmasi dan Perbekalan kesehatan. Kegiatan ini bersumberdana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan untuk UPTD Labkesda terdapat dana retribusi PAD.

aa) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan pada permenkes nomor 46 tahun 2015. Adapun tahapan dalam akreditasi puskesmas adalah Sosialisasi, pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping kabupaten/kota, mengusulkan puskesmas yang akan akreditasi ke komisi akreditasi FKTP dan penilaian oleh tim surveyor dari komisi akreditasi FKTP kementerian kesehatan.

bb) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Program imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pada anak dan dewasa. Adapun imunisasi yang diberikan diposyandu adalah

imunisasi hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG, campak dan imunisasi pentavalen (DPT, HiB, HB).

3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan standar pelayanan kesehatan primer adalah Sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan esensial (health care/primary care). Pelayanan kesehatan primer terbagi menjadi dua bagian yaitu upaya kesehatan perorangan (terdiri dari pelayanan pengobatan, pelayanan pemulihan, pelayanan peningkatan & pencegahan serta gaya hidup sehat /PHBS) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (peningkatan efektifitas UKBM).

b) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.

4) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sistem Informasi kesehatan (SIK) adalah suatu sistem pengelolaan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintahan secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penerapannya dinas kesehatan mempunyai aplikasi E-Puskesmas untuk penerapan SIK tingkat Puskesmas. Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan pengelolaan Data dan Informasi yang ada di dinas Kesehatan seperti Penyusunan Profil Dinas Kesehatan, Pelaporan SPM dan Penyusunan atau pelaporan SP2TP / E Puskesmas.

- b) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Sub Kegiatan ini mengakomodir pengadaan Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet untuk mendukung pelayanan terintegrasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas sektor lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.

- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

- 1) **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Dalam menjalankan fungsinya dinas kesehatan kabupaten merangin mempunyai kegiatan pembinaan kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan ini lebih di fokuskan pada penyuluhan kepada masyarakat untuk promosi kesehatan.

- a) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub kegiatan ini mengakomodir seluruh kegiatan Promosi Kesehatan seperti advokasi, Pemberdayaan, kemitraan melalui lintas sektor. Dan pembinaan terhadap pengelolaan Promosi kesehatan yang ada di Puskesmas maupun jejaringannya.

- 2) **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- 3) **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a) Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

- **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Program peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan terdiri dari tiga kegiatan dan empat sub kegiatan. Program ini mendukung misi 3 kepala

daerah yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- a) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Tujuan dari penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan yang kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini terdiri dari :

- a) Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- b) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Sub kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

• PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Dinas Kesehatan Kab. Merangin dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian, alkes, obat dan makanan dengan beberapa kegiatan diantaranya meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor dalam pengawasannya yaitu dengan pengawasan sistem on line e – wach bersama fasyankes kementerian kesehatan, pengembangan standarisasi dan kalibrasi alat, dan sosialisasi regulasi yang berlaku.

- 1) **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- 2) **Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
- 3) **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**
 - a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan an			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									147.864.043.100				166.581.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Dinas Kesehat an					50.371.800.000				110.849.749.134
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					21.250.600.000				29.830.035.571.345
Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun		Dinas Kesehata n					-	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			-

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		Dinas Kesehata n		2	Unit		896.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			1.850.000.000
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Dinas Kesehata n		1	Unit		560.000.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			600.000.000
Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		33	Unit		6.918.740.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			6.800.000.000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		11	Unit		1.041.300.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			1.750.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		Dinas Kesehata n		7	Unit		1.097.060.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			1.200.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinas Kesehata n		10	Unit		2.240.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			2.500.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Dinas Kesehata n		2	Unit		560.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			525.571.345
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Dinas Kesehata n		0	Unit		0	DAK Fisik Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			1.000.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regi onal Maintainance Center		Dinas Kesehata n		30	Unit		100.000.000	DAK Fisik Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			150.000.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		88	Unit		950.000.000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten.Kota			950.000.000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Dinas Kesehata n		80	Paket		6.250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			7.000.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan		Dinas Kesehata n		105.300	Keluarga		175.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan-			480,000,000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pendekatan Keluarga		Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas								Penguatan Sistem Kesehatan			
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)		Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		Dinas Kesehata n		10	Layanan		200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			300.000.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		Dinas Kesehata n		280	Paket		262.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik-Bidang Kesehatan- Penguatan Sistem Kesehatan			380,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					28.496.200.000				13.419.820.968

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		7421	Orang		317.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2.227.200.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		7165	Orang		260.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		670.985.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		7149	Orang		135.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		408.645.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		26439	Orang		150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		423.780.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		12341	Orang		170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		380.500.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan		Dinas Kesehata n		221734	Orang		113.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK		468.176.000	

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
		Kesehatan Sesuai Standar								Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		30452	Orang		135.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			817.290.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		66846	Orang		233.537.500	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			508.069.337
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		2896	Orang		251.462.500	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			358.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Prang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		526	Orang		180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			793.204.578

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		3123	Orang		170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			427.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		9828	Orang		75.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			253.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Dinas Kesehata n		4	Dokume n		30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			84.750.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Dinas Kesehata n		12	Dokume n		850.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			2.895.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olaharaga		Jumlah Dokumen Hasil Pengeloalan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrga		Dinas Kesehata n			3	Doku men	305.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			443.960.000
Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelyaan Kesehatan Lingkungan		Dinas Kesehata n			5	Doku men	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			1.014.000.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Dinas Kesehata n			4	Doku men	283.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			730.500.000
Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Dinas Kesehata n			1	Doku men	32.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			304.700.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Dinas Kesehata n			4	Doku men	174.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			448.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehata n			30	Orang	73.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			292.100.000
Pengelolaan Pelyanana Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehata n			10	Orang	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			373.330.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dinas Kesehata n			12	Doku men	920.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			3.652.580.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Haisl Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehata n			10	Doku men	20.552.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)			39.109.815.154
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan		Dinas Kesehata n			1	Paket	28.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			100.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat		Dinas Kesehata n			1	Doku men	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			456.995.968
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Mellalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Dinas Kesehata n			2	Unit	550.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			550,000,000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Dinas Kesehata n			1	Doku men	390.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			502,000,000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang		Dinas Kesehata n			10	Unit	136.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK			137.600.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
		Terakreditasi di Kabupaten/Kota								Dinas-BOK Kabupaten/Kota			
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Dinas Kesehatan			12	Laporan	89.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			89.800.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Drurat Terpadu (SPGOT)		Jumlah Pubic Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Dinas Kesehatan			1	Unit	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			252.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis		Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehatan			1103	Orang	307.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			582.193.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan an			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Dinas Kesehata n			10	Orang	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			228.923.752
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria		Dinas Kesehata n			39112	Orang	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			528.716.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Dinas Kesehata n			1	Doku men	30.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			261.800.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/KO ta		Dinas Kesehata n			1	Doku men	25.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			165.200.000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		Dinas Kesehata n			1	Doku men	50.000.000	Dana Alokasi Umum (Dau)			732.000.000
Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan		Dinas Kesehata n			1	Doku men	260.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK			807.200.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			Tolak Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
		Imunisasi								Dinas-BOK Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Dinas Kesehata n			1	Doku men	40.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			122.089.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				Dinas Kesehat an					180.000.000				195,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Dinas Kesehata n			2	Doku men	180,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			630.190.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					445.000.000				449.005.000
Peningkatan Mutu Pelyanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		Dinas Kesehata n			29	Unit	210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			211.890.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehtaan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Dinas Kesehata n			1	Doku men	235.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		237.115.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Dinas Kesehat an					1.903.500.000			2.266.437.500	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					28,500,000			135.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dinas Kesehata n			2	Doku men	28,500,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		135.000.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya				Dinas Kesehat an					40,000,000			46,000,000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinas Kesehata n			2	Doku men	40,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		46,000,000	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					1.835,000,000,000			2.085.437.500	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensiny a		Dinas Kesehata n			210	Orang	1,85,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		2.085.437.500	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Dinas Kesehat an					383.000.000			386.447.000	

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				Dinas Kesehatan					57.000.000				57.513.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Dinas Kesehata n			1	Doku men	57,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			57.513.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				Dinas Kesehatan					143,000,000				144.287.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Dinas Kesehata n			35	Doku men	143,000,000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		144.287.000	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				Dinas Kesehat an					183.000.000			184.647.000	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman		Dinas Kesehata n			62	Unit	183.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK		184.647.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan n	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan an			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan								Kabupaten/Kota			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Dinas Kesehat an					330.000.000				741.580.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					150.000.000				423.780.000
Peningkatan Upaya Promosi Kesehtaan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Dinas Kesehata n			2	Doku men	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			423.780.000
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehat an					115.000.000				116.000.000

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Volume	Satuan						
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Dinas Kesehatan			1	Dokumen	115.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			116.000.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Kesehatan					65.000.000				201.800.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Dinas Kesehatan			1	Dokumen	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota			201.800.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026 tertuang dalam 5 Program, 22 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan Nomenklatur terbaru pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Merangin. Adapun program dan kegiatan terdapat dalam tabel 4.1:

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP SKPD	Dinas Kesehatan	A		108.257.875.357	-	-	
		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Kesehatan	99	%	372.695.500	-	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai AKIP SKPD	Dinas Kesehatan	A		108.257.875.357	-	-	
X.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%	47.005.000	-	-	
X.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8	Dokumen	5.000.000			
X.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	8.505.000			
X.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	1	Dokumen				

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	3	Dokumen	10.000.000			
X.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	-			
X.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	4	Laporan	8.500.000			
X.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	6	Laporan	-			
X.1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	1	Berita Acara	-			
X.1.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	-			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.1.10	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Dinas Kesehatan	1	Subtansi	-			
X.1.11	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Dinas Kesehatan	2	Berita Acara	15.000.000			
X.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	100	%	108.210.870.357	-	-	
X.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	1470	Orang	108.085.090.357			
X.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	105.780.000			
X.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	4	Dokumen				
X.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	4	Laporan	10.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dinas Kesehatan	4	Laporan				
X.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	4	Laporan	10.000.000			
	PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Kesehatan	99	%	372.695.500	-	-	
X.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%	25.000.000	-	-	
X.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	1	Dokumen				
X.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan , pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	Dinas Kesehatan	1	Laporan				
X.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	3	Laporan				
X.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	4	Laporan	25.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%				
X.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Kesehatan	12	Laporan				
X.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%	33.410.500	-	-	
X.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Kesehatan	1	Paket				
X.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	5	Dokumen	17.250.000			
X.5.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	3	Dokumen	7.497.000			
X.5.4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	3.750.000			
X.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Kesehatan	1	Orang	-			
X.5.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	8	Orang	4.913.500			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.5.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	8	Orang				
X.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%	179.285.000	-	-	
X.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket	10.000.000			
X.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	6	Paket				
X.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket	-			
X.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket	15.000.000			
X.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket	-			
X.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	5	Dokumen	-			
X.6.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket	-			
X.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	1	Laporan	5.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	100	Laporan	149.285.000			
X.6.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	7	Dokumen				
X.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	100	%				
X.7.1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	1	Paket				
X.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	Unit				
X.7.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Kesehatan	120	Unit				
X.7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Dinas Kesehatan	2	Unit				
X.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	100	%				
X.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12	Laporan				

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
X.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Kesehatan	12	Laporan				
X.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	95	%	135.000.000	-	-	
X.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan	61	Unit	50.000.000			
X.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	25	Unit	50.000.000			
X.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Kesehatan	15	Unit	-			
X.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	3	Unit	35.000.000			
X.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	96	%				
X.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dinas Kesehatan	27	Unit				
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL MUTU	Dinas Kesehatan	-					

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PUSKESMAS TERAKREDITASI MINIMAL MADYA		27					
		Indikator Nasional Mutu		0,69		12.960.456.248	28.930.217.900	22.935.968.833	
		Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC		0,9					
		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		0,98					
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		0,92					
		Puskesmas yang Melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)		0,55					
		1.1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	70	%	2.611.073.048
1.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Dinas Kesehatan	2	Unit	444.123.000			
1.1.2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Dinas Kesehatan	2	Unit				

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.1.3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Dinas Kesehatan	0	Unit				
1.1.4	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	14	Unit	1.214.359.998	8.962.616.000		
1.1.5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	10	Unit	45.900.000			
1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	3	Unit				
1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan	14	Unit				

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.1.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	22	Unit	469.540.000			
1.1.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan	15	Unit				
1.1.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Dinas Kesehatan	1	Unit				
1.1.11	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Dinas Kesehatan	14	Unit				
1.1.12	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah Obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	380	Paket				
1.1.13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	420	Unit		84.597.395		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.1.14	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	332	Kali	437.150.050	277.777.000		
1.1.15	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan kesehatan berbasis telemedicine) yang dilakukan pengembangan	Dinas Kesehatan	12	Layanan				
1.1.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan	106200	Keluarga				
1.1.17	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Dinas Kesehatan	2	Unit				
1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	%	8.985.620.000	6.733.361.605	1.876.500.000	

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.2.1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	1	Dokumen				
1.2.2	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	27	Dokumen	8.391.600.000	6.311.685.000	1.826.500.000	
1.2.3	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	363.020.000	102.958.605	50.000.000	
1.2.4	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Unit		32.400.000	318.718.000		
1.2.5	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	1	Unit	198.600.000			
1.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN	Dinas Kesehatan	86	%	85.050.000	-	-	
1.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	85.050.000			
1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi Izin	Dinas Kesehatan	89	%	260.400.000	-	-	
1.4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	29	Unit	208.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.4.2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	52.400.000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional menuju UHC	Dinas Kesehatan	90	%	-	-	21.059.468.833	
1.5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	82	%	-	-	21.059.468.833	
1.5.1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	4	Dokumen			21.059.468.833	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	98	%	333.913.200	2.142.551.900	-	
1.6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	%	333.913.200	2.142.551.900	-	
1.6.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	5799	Orang	35.000.000	581.788.000		
1.6.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	7477	Orang	40.267.000	66.962.000		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.6.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	0	Dokumen				
1.6.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	4	Dokumen				
1.6.5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	18.000.000	284039000		
1.6.6	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	34.000.000	766.871.900		
1.6.7	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dinas Kesehatan	26	spesimen		15.835.000		
1.6.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	1074	Orang	83.000.000	328.509.000		
1.6.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	11	Orang	50.653.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.6.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Dinas Kesehatan	5606	Orang	72.993.200	98.547.000		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	92	%	147.000.000	218.337.000	-	
1.7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	%	147.000.000	218.337.000	-	
1.7.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	67112	Orang	67.500.000			
1.7.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	3450	Orang	18.000.000			
1.7.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	543	Orang	36.500.000			
1.7.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	14396	Orang	10.000.000	218.337.000		
1.7.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	Orang	15.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.7.6	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Dinas Kesehatan	1100	Orang				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Puskesmas yang Melaksanakan ILP (Integrasi Layanan Primer)	Dinas Kesehatan	55	%	537.400.000	10.510.977.000	-	
1.8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Standar Pelayanan (SPM) Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	%	537.400.000	10.510.977.000	-	
1.8.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	6708	Orang	44.400.000	1.133.093.500		
1.8.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	6424	Orang		34.141.000		
1.8.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	5852	Orang		547.998.800		
1.8.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	30321	Orang	15.000.000	49.692.500		
1.8.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	77580	Orang	10.000.000	949.199.100		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.8.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	285075	Orang	15.000.000			
1.8.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	26405	Orang	15.000.000			
1.8.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	80.000.000	5.070.101.000		
1.8.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	3	Dokumen	35.000.000			
1.8.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	5	Dokumen	151.000.000	1685861900		
1.8.11	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	4	Dokumen		856104000		
1.8.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	10.000.000			
1.8.13	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	45.000.000			
1.8.14	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	12	Dokumen	44.000.000	79.987.600		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
1.8.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan	3	Dokumen	15.000.000			
1.8.16	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	2	Dokumen	25.000.000			
1.8.17	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	8	Dokumen		104.797.600		
1.8.18	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Layanan imunisasi	Dinas Kesehatan	12	Dokumen	18.000.000			
1.8.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Haji	Dinas Kesehatan	2	Dokumen	15.000.000			
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap Populasi	Dinas Kesehatan	40	%	86.000.000	1.295.897.000	-	
2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Izin Praktik	Dinas Kesehatan	72	%	25.000.000			
2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	25.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Rencana Kebutuhan di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	30	%	61.000.000			
2.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	Dokumen	61.000.000			
2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang mengikuti Uji Kompetensi	Dinas Kesehatan	15	%		1.295.897.000		
2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Dinas Kesehatan	220	orang		1.295.897.000		
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE FASILITAS KEFARMASIAN YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN	Dinas Kesehatan	64	%	25.000.000	569.932.000	-	
3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Dinas Kesehatan	60	%	25.000.000	168.451.005		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	2	Dokumen	25.000.000	168.451.005		
3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mendapatkan SPP-IRT	Dinas Kesehatan	60	%	-	143.299.000		
3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	1	Dokumen		143.299.000		
3.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi dan Produk Pangan IRT yang memenuhi ketentuan	Dinas Kesehatan	100	%	-	258.181.995		

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
3.3.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	62	Sarana		258.181.995		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Penduduk yang menerapkan Prilaku Hidup Sehat	Dinas Kesehatan	64	%	25.000.000	236.652.600	-	
4.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang memiliki Kebijakan Meningkatkan Germas	Dinas Kesehatan	85	%	-	-		
4.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1	Dokumen				
4.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menerapkan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	24	kec	25.000.000			
4.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	4	Dokumen	25.000.000			

No.	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu indikatif (Sumber Dana)(Rp.)			
				Volume	Satuan	DAU	DAK	PAD	
4.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan Posyandu Aktif	Dinas Kesehatan	35	%		236.652.600		
4.3.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	4	Dokumen		236.652.600		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas – tugas dan kegiatan kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026. Tingkatan keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD.

Dari permasalahan yang telah dibahas dalam renja ini dihasilkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sub Kegiatan	Penyebab Tidak tercapainya	Rencana Tindak Lanjut
1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat pada saat Proses lelang. (tidak ada yang terkontrak)	Memperbaiki berkas kontrak sesuai dengan standar spesifikasi rumah Dinas Tenaga Kesehatan agar kontrak dapat dipahami oleh rekanan
2	Pengembangan Puskesmas	Alokasi dana untuk pengembangan Puskesmas di alihkan ke sub kegiatan yang sesuai dengan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Intruksi Kemendagri dan permendagri ini mengharuskan Kegiatan sesuai rekening pada	Merencanakan pengembangan Puskesmas melalui dana yang bersumber dari DAK

		pemetaan	
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat pada saat Proses lelang (tidak ada yang terkontrak)	Memperbaiki berkas kontrak sesuai dengan standar spesifikasi sarana fasilitas pelayanan Kesehatan agar kontrak dapat dipahami oleh rekanan
4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tidak ada rekanan yang memenuhi syarat pada saat Proses lelang (tidak ada yang terkontrak)	Memperbaiki berkas kontrak sesuai dengan standar spesifikasi prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan agar kontrak dapat dipahami oleh rekanan
5	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sebagian Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Tayang di <i>E-Katalog</i> (tidak terkontrak)	- Melatih <i>SDM</i> agar mampu merencanakan pengadaan sesuai dengan <i>E Katalog</i> - Merencanakan Pengadaan alat kesehatan / Alat penunjang medik sesuai spesifikasi yang tayang di <i>E – Katalog</i>
6	Pengadaan Obat, Vaksin	Sebagian Pengadaan Obat, Vaksin Tidak Tayang di <i>E-Katalog</i> (tidak terkontrak)	- Melatih <i>SDM</i> agar mampu merencanakan pengadaan sesuai dengan <i>E- Katalog</i> - Merencanakan Pengadaan Obat, Vaksin penunjang medik sesuai spesifikasi yang tayang di <i>E – Katalog</i>
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Tidak semua ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sehingga standar pelayanan ANC yang harus dilakukan tidak terpenuhi - Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Muara Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul. - Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan kehamilan	1. Memperkuat sistem pelayanan ANC terpadu di setiap puskesmas. 2. Meningkatkan promosi kesehatan. 3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor 4. Melakukan kunjungan rumah untuk ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang sesuai standar 5. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Akses layanan kesehatan yang sulit ditempuh seperti Puskesmas Muara Madras, Rantau Suli dan Muara Kibul - Terbatasnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Sumber Daya yang belum merata - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir	1. Kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan perbaikan jalan menuju sarana pelayanan kesehatan (PUPR) melalui pembahasan di Musrenbang 2. Pelatihan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan Bayi baru Lahir 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Akses layanan kesehatan yang sulit dijangkau - Pemanfaatan Posyandu belum optimal - Masih kurangnya kesadaran Ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu - Beberapa Posyandu belum memiliki Sarana dan Prasarana yang lengkap sesuai standar untuk pengukuran tumbuh kembang Balita - Pemberdayaan Masyarakat dan Kader yang belum optimal	1. Kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan perbaikan jalan menuju sarana pelayanan kesehatan (PUPR) melalui pembahasan di Musrenbang 2. Meningkatkan peran serta kader dan masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatan balita. 3. Melakukan promosi kesehatan terkait pelayanan kesehatan balita 4. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar untuk pengukuran tumbuh kembang balita di Posyandu 5. Mengadakan pelatihan untuk masyarakat dan kader dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Balita
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Pada saat pemberian pelayanan kesehatan siswa tidak hadir dikarenakan sakit atau izin	- Melakukan kunjungan ulang atau melakukan swiping untuk melakukan pelayanan kesehatan kembali kepada siswa yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. - Melakukan edukasi kepada siswa mengenai manfaat pelayanan kesehatan di Sekolah - Meningkatkan kerjasama lintas sektor untuk pelayanan UKS

11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	- BHP Medis yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah Usia produktif yang diberi layanan kesehatan - Pemanfaatan posbindu PTM yang belum maksimal	1. Meningkatkan promosi kesehatan tentang penyakit <i>degenerative</i> 2. Menggalakkan kegiatan posbindu di setiap desa 3. Meningkatkan kerjasama lintas sector 4. Menambah jumlah BHP Medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada usia produktif
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- BHP Medis yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah Hipertensi yang diberi layanan kesehatan - Ada beberapa posbindu PTM yang belum aktif dalam memberikan layanan kesehatan	1. Meningkatkan promosi kesehatan tentang penyakit <i>Hipertensi</i> 2. Menggalakkan kegiatan posbindu di setiap desa 3. Meningkatkan kerjasama lintas sector 4. Menambah jumlah BHP Medis yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada usia produktif
13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Adanya pandemi covid-19 berdampak terhadap terbatasnya penyediaan obat-obatan dan BHP kesehatan	- Pengadaan persediaan Obat-obatan dan BHP Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan, mandiri, dan tradisional lainnya SDM yang belum terlatih untuk pelayanan tradisional	- SDM yang belum terlatih untuk pelayanan tradisional - Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional yg belum optimal - Masih terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan kesehatan tradisional	1. Melakukan pelatihan bagi SDM kesehatan dan masyarakat terkait pelayanan kesehatan tradisional 2. Melakukan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional yang belum optimal 3. Menambah anggaran untuk mendukung kegiatan kesehatan tradisional bersumber dari dana alokasi umum

15	Pengelolaan surveilans kesehatan,	- Keterbatasan Jumlah SDM Surveilans yang terlatih - Rendahnya Kepatuhan petugas dalam menginput dan melaporkan data melalui sistem, sehingga pelaporan tidak tepat waktu	1. Mengadakan Pelatihan bagi SDM surveilans 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan data surveilans kesehatan
16	Pengelolaan upaya kesehatan khusus,	Tidak ada pemberangkatan Haji pada Tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19 mengakibatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan imunisasi pada calon jamaah haji tidak terlaksana	- Melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan haji dan pelaksanaan imunisasi untuk calon Jamaah haji sesuai jadwal
17	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal),	- Laporan kejadian yg tidak diinginkan pasca imunisasi dan POPM belum optimal - Monitoring dan evaluasi pasca imunisasi belum berjalan dengan baik	1. Mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang monitoring dan evaluasi pasca imunisasi
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kebijakan dari tim TAPD Kabupaten untuk tidak mengganggu Kendaraan Dinas melalui dana DAU pada Tahun tersebut	- Mengusulkan kembali pengadaan kendaraan Dinas melalui dana DAU
19	Pengadaan Mebel	Adanya Peralihan anggaran ke program prioritas	- Mengusulkan kembali pengadaan Mebel dengan dana bersumber dari DAU
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Pada tahun 2021 BPKPSDM tidak menyelenggarakan kegiatan diklat PIM, sehingga anggaran dikembalikan ke kas Negara	- Mengusulkan kembali dana untuk mengikuti Diklat PIM
21	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kegiatan penyusunan Perbub Retribusi tidak dilaksanakan oleh pemegang program (Sub. Bag Hukum dan Kepegawaian)	- mengusulkan dana untuk mengikuti pelatihan penyusunan perbub retribusi bagi subbag hukum dan kepegawaian - Melaksanakan pertemuan dengan Puskesmas, dan UPTD terkait perubahan Retribusi

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Diiringi peran aktif stekholder. Tanpa kerjasama yang harmonis maka pencapaian tidak akan optimal.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MERANGIN**



drg. H. SONY PROPE SMA, M.Ph
NIP. 19711012 200212 1 004

Lampiran 1

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Usulan Kecamatan yang di Tolak

No	Pengusul	Permasalahan	Usulan	Alamat	Alasan
1. Kecamatan Bangko					
1	SARIFUDDI N,S.Pd	Belum ada alat laboratorium sederhana	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Lingkungan Talang Kawo Rt 17 RW 07, Kab. Merangin, Bangko, Dusun Bangko	Alat Kesehatan diusulkan melalui Program SHOPI Puskesmas
2. Kecamatan Bangko Barat					
2	SUSILO	KURANG NYA RUANG RAWAT DI PUSTU DESA BUKIT BERINGIN SEHINGGA MENGURANGI EFEKTIVITAS PADA SAAT PELAYANAB	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	DESA BUKIT BERINGIN, Kab. Merangin, Bangko Barat, Bukit Beringin	diusulkan rehabilitasi melalui DAK FISIK
3	Aswadi	alat kesehatan pustu dan posyandu belum memadai dan belum maksimal	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	posyandu mawar rt 002 fan posyandu melati rt 009 desa Biuku Tanjung, Kab. Merangin, Bangko Barat, Biuku Tanjung	Alat Kesehatan diusulkan melalui Program SHOPI Puskesmas
4	DASRIAL	Pembangunan aula/serbaguna Puskesmas Bangko Barat Panjang 15 meter x lebar 10 meter karena aula serbaguna sangat dibutuhkan di Puskesmas Bangko Barat Kecamatan Bangko	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Puskesmas Bangko Barat RT 008 Dusun Pinang Penawar, Kab. Merangin, Bangko Barat, Pulau Rengas	Kegiatan pembangunan Aula dilaksanakan T.A 2025

5	SUSILO	karena jarak dan waktu ketika ada masyarakat sakit untuk dibawa ke RS untuk sementara warga berobat di lingkup kesehatan desa yaitu polindes dan pustu namun masih ada beberapa sarana dan prasarana penunjang yang harus di lengkapi	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	DESA BUKIT BERINGIN, Kab. Merangin, Bangko Barat, Bukit Beringin	Alat Kesehatan diusulkan melalui Program SHOPI Puskesmas
6	Aswadi	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	batuan bpjs kesehatan bagi masyarakat miskin, masih banyak warga miskin yang belum mendapat program PBI JKN 65 kk	desa Biuku Tanjung, Kab. Merangin	menyesuaikan dengan data Dinas Sosial
3. Kecamatan Pamenang					
7	SUYANTO	Dibutuhkan Pembangunan Puskemas Perawatan/ Puskesmas Rawat Inap di Desa Tanah Abang, karna jarak Desa Tanah Abang ke Puskemas Perawatan Inap terdekat berjarak 18 Km	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Tanah Abang, Kab. Merangin, Pamenang, Tanah Abang	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
8	Agus Sulaiman	Kurang memadainya kamar mandi (mck) di ruang bersalin pustu Desa pematang kancil dengan volume 10.000 m2	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	RT. 07 RW.01 Pustu Desa Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Kab. Merangin, Kab. Merangin, Pamenang, Pematang Kancil	diusulkan rehabilitasi melalui DAK FISIK
9	YULI WIDODO, S.Hi	belum adanya pembangunan pagar Beton Puskesmas	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Rejo Sari, RT.008 RW.002 , Kab. Merangin, Pamenang, Rejo Sari	agar mengalokasikan dengan dana Desa

10	YULI WIDODO, S.Hi	Penambahan sarana ruang IGD di Polindes	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Rejo Sari, RT.008 RW.004, Kab. Merangin, Pamenang, Rejo Sari	agar mengalokasikan dengan dana Desa
11	SYOFWAN	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	belum adanya mobil ambulance desa untuk membawa masyarakat yang ingin berobat.	desa karang anyar, Kab. Merangin	agar mengalokasikan dengan dana Desa
12	SYOFWAN	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	masih banyak nya masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS) gratis	desa karang anyar, Kab. Merangin	menyesuaikan dengan data Dinas Sosial
4. Kecamatan Pamenang Selatan					
13	ANHAR	untuk meningkat kenyamanan dan keamanan lingkungan yang ada di pustu	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Selango, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Selango	diusulkan rehabilitasi melalui DAK FISIK
14	ANHAR	untuk meningkat pelayanan masyarakat yang butuh perawatan dan pengobatan di pustu	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Selango, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Selango	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
5. Kecamatan Renah Pamenang					
15	Cecep supriyadi	Masih kurangnya pusat informasi ,literasi,dan advokasi kebijakan di bidang kesehatan di desa	Belum optimalnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Desa Bukit Bungkul, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Bukit Bungkul	Usulan tidak terinci

16	SRI HERMAWA N, S.KM	Kurang tersedianya unit komputer Puskesmas Meranti	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Puskesmas Meranti Desa Meranti, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti	Usulan tidak terinci
17	SRI HERMAWA N, S.KM	Dikarenakan kondisi bangunan Puskesmas Meranti yang dibangun sejak 1980 dan sudah tidak mampu untuk melayani rawat inap, serta juga mengingat banyaknya pasien yang datang ke Puskesmas Meranti, maka perlu dibangun Rumah Sakit Tipe D yang mana dapat menjadi Rumah Sakit Rujukan untuk 12 Desa di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin.	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Kab. Merangin, Kab. Merangin, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
18	SUKAMTO	Masih banyaknya prasarana pustu yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (di Perlukan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik) Sebanyak Satu Paket	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
19	SUKAMTO	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik), di Perlukan Pembangunan Pagar dan Mebeler di Posyandu Sebanyak 3 (tiga) Unit Posyandu	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas

20	SUKAMTO	Masih banyaknya prasarana Kesehatan (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik), Perlu Rehap Rumah Bidan Desa Lantak Seribu 1 Unit	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Dusun Sumber Mulyo Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
6. Kecamatan Pamenang Barat					
21	MUHAMMAD HELMI, S.KOM	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	PEMBANGUNAN AULA PUSKESMAS PAMENANG BARAT 1 PAKET	Desa Simpang Limbur Merangin Kec. Pamenang Barat , Kab. Merangin, ,	Usulan sudah dimasukkan kedalam Renja T.A 2026
22	S. Arman	sangat di butuhkan penunjang atau prasarana puskesmas pembantu desa mampun baru sesuai dengan standar pelayanan	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	puskesmas pembantu desa mampun baru, Kab. Merangin, Pamenang Barat, Mampun Baru	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
23	PATRIANUSANANTASAMOSIR, S.Kom	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	mobiler yang sudah tidak bisa dipakai	Desa mampun baru, Kab. Merangin, ,	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
7. Kecamatan Tabir					
24	MASDUKI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehap jalan akses masuk puskesmas pasar baru	puskesmas pasar baru, Kab. Merangin	Jalan akses masuk Puskesmas agar diusulkan melalui OPD PUPR
25	MASDUKI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehap lantai keramik puskesmas pasar baru	puskesmas , Kab. Merangin	Usulan sudah dimasukkan kedalam Renja T.A 2026

26	MASDUKI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehab gedung pencatatan puskesmas	puskesmas, Kab. Merangin	diusulkan rehabilitasi melalui DAK FISIK
27	MASDUKI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	perlunya rehab gedung puskesmas, pengadaan lemari, meja, tempat tidur, kursi pelayanan	puskesmas, Kab. Merangin	agar mengalokasikan dengan dana Desa
28	MASDUKI	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	perlunya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	puskesmas, Kab. Merangin	agar mengalokasikan dengan dana Desa
8. Kecamatan Tabir Selatan					
29	KHOIRUL ANAM	Pembangunan MCK Puskesmas Pembantu Volume 1 Set	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jalan Lumba-Lumba RT.005, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Rawa Jaya	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
30	KHUSAENI	Polindes desa sungai sahut memerlukan Meja untuk Persalinan ibu hamil	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Mentawai Desa Sungai SAhut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut	agar mengalokasikan dengan dana Desa
31	KHUSAENI	Polindes desa sungai sahut memerlukan Box Bayi baru lahir untuk menunjang kelengkapan bersalin ibu melahirkan	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Mentawai Desa Sungai SAhut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut	agar mengalokasikan dengan dana Desa
32	KHUSAENI	Perlu adanya pembangunan MCK di Puskesmas Pembantu Desa Sungai SAhut	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jl. Mentawai Desa Sungai SAhut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK

33	NUPRIYADI	pendukung dipustu dengan halaman yang becek saat hujan sehingga menghambat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Abdul Manaf RT.009 Desa Sinar Gading, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sinar Gading	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
34	NUR WIDIYANT O	Karena belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk posyandu Lestari Waras dan Posyandu Sumber Waras, mohon untuk kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial (Pembangunan Mesjid, gapura, Mushola, Ponpes) sesuai prioritas dan kondisi riil di lokasi	Desa Gading Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Gading Jaya	agar mengalokasikan dengan dana Desa
35	NUR WIDIYANT O	Mohon meningkatkan pelayanan di puskesmas pembantu mohon untuk pembuatan pagar keliling	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jalan Garuda, Dusun Mekar Asri, Desa Gading Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Gading Jaya	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
36	KHUSAENI	Halaman di sekitar pustu sangat licin ketika hujan, sehingga untuk memperlancar kegiatan di puskesmas pembantu, di perlukannya pemasangan paving block	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	jl. mentawai desa sungai sahut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
37	SARNO	Kondisi alat penunjang Puskesmas Pembantu yang kurang memadai	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Bungo Tanjung, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Bungo Tanjung	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
9. Kecamatan Tabir Timur					
38	H.Ngatijan. SE	Kurangnya Fasilitas Kesehatan maka meminta dibangun PUSTU Lengkap	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Dusun Padang Kelapo, Desa Sungai Limau, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Limau	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK

39	Assarpi	Belum adanya plafon di Posyandu Bina Husada sehingga perlu pembangunan plafon untuk menambah keindahan dan kenyamanan pengguna	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Posyandu Bina Husada Jalan Gelatik, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	agar mengalokasikan dengan dana Desa
40	Assarpi	Lantai Posyandu Bina Husada banyak yang sudah rusak sehingga perlu pemasangan keramik untuk menambah keindahan dan kenyamanan pengguna	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Posyandu Bina Husada Jalan Gelatik, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	agar mengalokasikan dengan dana Desa
41	Assarpi	Belum tersedianya tempat ibadah / mushola di Puskesmas Sungai Bulian sehingga tenaga kesehatan dan keluarga pasien dalam menjalankan ibadah menggunakan ruang rawat kerja dan ruang inap, maka dibutuhkan pembangunan mushola	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
42	Assarpi	Belum adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien rawat inap, sehingga ruang rawat inap tampak penuh, sehingga diperlukan pembangunan ruang tunggu keluarga pasien rawat inap agar pasien tidak merasa terganggu	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
43	Assarpi	Rumah dinas yang ada belum mencukupi untuk para medis yang ada, sehingga diperlukan pembangunan rumah dinas lagi untuk menunjang pelayanan di Puskesmas	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK

44	Assarpi	Perlunya pembangunan pagar keliling di Puskesmas Desa Sungai Bulian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
45	Assarpi	Perlunya pembangunan koridor/selasar dari UGD ke Ruang Rawat Inap di Puskesmas Sungai Bulian dengan ukuran 30 x 2 M untuk memudahkan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
46	Assarpi	Box culvert yang ada sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan pembangunan box culvert Jalan masuk ke Puskesmas Sungai Bulian untuk memudahkan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
47	Assarpi	Kondisi halaman puskesmas yang licin dan becek pada musim penghujan menghambat pelayanan kesehatan sehingga diperlukan pembangunan paving blok untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Bulian	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
10. Kecamatan Tabir Ilir					
48	SUWARNI	kurangnya mubeler posyandu	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial (Pembangunan Mesjid, gapura, Mushola, Ponpes) sesuai prioritas dan kondisi riil di lokasi	desa kota raja, Kab. Merangin, Tabir Ilir, Kota Raja	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
11. Kecamatan Tabir Ulu					

49	Abdul hadi	Belum Optimalnya Pemberian makan tambahan (PMT),kursi plastik posyandu 10 buah,Dopler,HB digital,Tensi Digital,Pita Senti Meter,Mesin Sanyo,Kawar duri,Pintu Pagar Roling Besi Posyandu 1 set,Tralis pintu Besar 2 pintu,Tralis Pintu Jendela 14 lobanng,Pintu Kaca Jendela 4 Lobang.	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Muara Jernih,Kab Merangin, Kab. Merangin, Tabir Ulu, Muara Jernih	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
12. Kecamatan Margo Tabir					
50	Supardi	KURANGNYA SARANA KESEHATAN BERUPA POSYANDU DAN RUANG BERSALIN	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Suko Rejo, Kab. Merangin, Margo Tabir, Suko Rejo	agar mengalokasikan dengan dana Desa
13. Kecamatan Tabir Barat					
51	SANDRI CAN INDRA	masih banyak peralatan yang belum memadai untuk meningkatkan fasilitas kesehatan puskesmas desa mauara kibil	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Muara Kibul, Kab. Merangin, Tabir Barat, Muara Kibul	Alat Kesehatan diusulkan melalui program SHOPI di Puskesmas
52	AS''ARI EL WAKAS.SH	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Lingkungan Puskesmas Yang Sering Dimasuki Oleh Hewan dan Pengamanan Aset perlu adanya Pembangunan Pagar Puskesmas Muara Kibul	Desa Muara Kibul, Kec. Tabir Barat, Kab. Merangin, ,	Kegiatan pembangunan pagar dilaksanakan T.A 2025
14. Kecamatan Lembah Masurai					
53	ARMADI	kurangnya sarana dan prasarana di posyandu	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Muara Kelukup, Kab. Merangin, Lembah Masurai, Muara Kelukup	agar mengalokasikan dengan dana Desa

15. Kecamatan Jangkat Timur					
54	SALMAN,S. PdI	TIDAK ADANYA GEDUG RUMAH DESA SEHAT	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	DESA RANTAU SULI, Kab. Merangin, Jangkat Timur, Rantau Suli	agar mengalokasikan dengan dana Desa
16. Kecamatan Sungai Manau					
55	AGUS HAPKAND RI	Belum Tersedianya Dapur PUSKESDES Sehingga mengganggu kenyamanan dan ketentraman Bidan Desa Dalam Menjalankan Tugas	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Desa Gelanggang, Kab. Merangin, Sungai Manau, Gelanggang	agar mengalokasikan dengan dana Desa
56	M.razali	DENGAN ADANYA GEDUNG PAUD AKAN MEMPERLANCAR BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	DUSUN SENGGERING DESA TIANGKO, Kab. Merangin, Sungai Manau, Tiangko	Usulan tidak terinci
57	SAIDINA USMAN	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Butuh nya Paving Blok utuk Area Puskesmas	Peskesmas Dusun Tengah desa Sungai manau, Kab. Merangin	diusulkan pembangunan melalui DAK FISIK
17. Kecamatan Nalo Tantan					
58	AHMAD FAHMI, S.H.,MH	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	belum adanya bangunan posyandu di daerah sekitar	RT 26 BTN Pertanusa Desa Sungai Ulak, Kab. Merangin, ,	agar mengalokasikan dengan dana Desa
18. Kecamatan Tiang Pumpung					

59	H.SAPRI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tidak adanya tenaga ahli gizi dipuskesmas sekancing menyebabkan berkurangnya kelayakan dan kurang optimalnya puskesmas dalam melayani msyarakat, oleh karena itu perlu adanya Pengadaan Tenaga Kesehatan Gizi sebanyak 1 Orang guna memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat	RT. 001 RW. 001/Dusun I, Kab. Merangin	akan ditindaklanjuti melalui bagian Kepegawaian
60	H.SAPRI	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tidak adanya tenaga labor dipuskesmas sekancing menyebabkan berkurangnya kelayakan dan kurang optimalnya puskesmas dalam melayani msyarakat, oleh karena itu perlu adanya Pengadaan Tenaga labor sebanyak 1 Orang guna memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat	RT. 001 RW. 001/Dusun I, Kab. Merangin	akan ditindaklanjuti melalui bagian Kepegawaian
61	ZAINUDDIN	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tes saja jagang diterima Gedung puskesmas rusak berat, atap bocor perlu penggantian atap sebanyak 5 ruang	Dusun 1 RT 14, Kab. Merangin	

Lampiran 2

Usulan kecamatan Kab. Merangin Bidang Kesehatan

No	Permasalahan	Usulan	Alamat
1	KURANG NYA RUANG RAWAT DI PUSTU DESA BUKIT BERINGIN SEHINGGA MENGURANGI EFEKTIVITAS PADA SAAT PELAYANAB	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	DESA BUKIT BERINGIN, Kab. Merangin, Bangko Barat, Bukit Beringin
2	Kondisi Bangunan Pustu Desa Tanah Abang sudah diperlukan Perbaikan. Kondisi Bangunan atap sudah ada yang bocor, Plafon sudah Rusak	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Tanah Abang Rt 19, Kab. Merangin, Pamenang, Tanah Abang
3	lingkungan puskesmas desa Keroya tidak ada pagar keliling, maka dari itu Desa mengajukan permohonan pagar keliling Puskesmas	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Keroya, Rt. 008, Rw. 002 , Kab. Merangin, Pamenang, Keroya
4	Dibutuhkan Pembangunan Puskemas Perawatan/ Puskesmas Rawat Inap di Desa Tanah Abang, karna jarak Desa Tanah Abang ke Puskemas Perawatan Inap terdekat berjarak 18 Km	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Tanah Abang, Kab. Merangin, Pamenang, Tanah Abang
5	1. resiko pencurian dan kerusakan sehingga membutuhkan pagar sebagai keamanan 2. tidak adanya pembatas area sebagai pencegah kecelakaan	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	PUSTU, RT 09, Desa Bukit Intan, Kab. Merangin, Pamenang, Sungai Udang

6	Kurang memadainya kamar mandi (mck) di ruang bersalin pustu Desa pematang kancil dengan volume 10.000 m2	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	RT. 07 RW.01 Pustu Desa Pematang Kancil Kecamatan Pamenang Kab. Merangin, Kab. Merangin, Pamenang, Pematang Kancil
7	kurangnya sarana dan prasarana di posyandu	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Muara Kelukup, Kab. Merangin, Lembah Masurai, Muara Kelukup
8	Kurangnya Fasilitas Kesehatan maka meminta dibangun PUSTU Lengkap	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Dusun Padang Kelapo, Desa Sungai Limau, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Limau
9	Belum Tersedianya Dapur PUSKESDES Sehingga mengganggu kenyamanan dan ketentraman Bidan Desa Dalam Menjalankan Tugas	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Desa Gelanggang, Kab. Merangin, Sungai Manau, Gelanggang
10	Pengadaan Alat Faskes Puskesmas Pembantu Volume 1 Set	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jalan Lumba-Lumba RT.005, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Rawa Jaya
11	Pembangunan MCK Puskesmas Pembantu Volume 1 Set	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jalan Lumba-Lumba RT.005, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Rawa Jaya
12	TIDAK ADANYA GEDUG RUMAH DESA SEHAT	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	DESA RANTAU SULI, Kab. Merangin, Jangkat Timur, Rantau Suli
13	alat kesehatan pustu dan posyandu belum memadai dan belum maksimal	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	posyandu mawar rt 002 fan posyandu melati rt 009 desa Biuku Tanjung, Kab. Merangin, Bangko Barat, Biuku Tanjung

14	Pembangunan aula/serbaguna Puskesmas Bangko Barat Panjang 15 meter x lebar 10 meter karena aula serbaguna sangat dibutuhkan di Puskesmas Bangko Barat Kecamatan Bangko	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Puskesmas Bangko Barat RT 008 Dusun Pinang Penawar, Kab. Merangin, Bangko Barat, Pulau Rengas
15	Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskemas Bangko Barat panjang 12 meter x lebar 6 Meter karena Puskesmas Bangko Barat belum memiliki Ruangan Rawat Inap	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Puskesmas Bangko Barat RT 008 Dusun Pinang Penawar, Kab. Merangin, Bangko Barat, Pulau Rengas
16	Pembangunan pagar puskesmas Bangko Barat sepanjang 200 meter karena pagar puskesmas Bangko Barat bagian belakang belum ada	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Bangko Barat RT 008 Dusun Pinang Penawar, Kab. Merangin, Bangko Barat, Pulau Rengas
17	Perlu pembangunan/perbaikan jalan setapak/rabat beton puskesmas bangko barat volume panjang 150 meter x lebar 4 meter karena jalan setapak/rabat beton puskesmas Bangko Barat sudah rusak	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Bangko Barat RT 008 Dusun Pinang Penawar, Kab. Merangin, Bangko Barat, Pulau Rengas
18	Halaman di sekitar pustu sangat licin ketika hujan, sehingga untuk memperlancar kegiatan di puskesmas pembantu, di perlukannya pemasangan paving block	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	jl. mentawai desa sungai sahut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut
19	Polindes desa sungai sahut belum memiliki ruang Nifas untuk ibu hamil	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Mentawai Desa Sungai Sahut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut

20	Polindes desa sungai sahut memerlukan Meja untuk Persalinan ibu hamil	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Mentawai Desa Sungai SAhut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut
21	Polindes desa sungai sahut memerlukan Box Bayi baru lahir untuk menunjang kelengkapan bersalin ibu melahirkan	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Mentawai Desa Sungai SAhut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut
22	Belum adanya plafon di Posyandu Bina Husada sehingga perlu pembangunan plafon untuk menambah keindahan dan kenyamanan pengguna	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Posyandu Bina Husada Jalan Gelatik, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
23	Lantai Posyandu Bina Husada banyak yang sudah rusak sehingga perlu pemasangan keramik untuk menambah keindahan dan kenyamanan pengguna	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Posyandu Bina Husada Jalan Gelatik, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
24	kurangnya fasilitas Turap diarea PUSTU Desa Pauh Menang sehingga mengakibatkan tidak terkondisikanya aliran air saat hujan turun.	Peningkatan Turap pengaman Bangunan Fasilitas umum	Desa Pauh Menang Rt 01/Rw 01, Kab. Merangin, Pamenang, Pauh Menang
25	Keterbatasanya sarana dan prasarana MCK diarea PUSTU Desa Pauh Menang	Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (Pembangunan MCK + MCK Komunal)	Desa Pauh Menang Rt 01/Rw 01, Kec Pamenang, Kab Merangin, Kab. Merangin, Pamenang, Pauh Menang
26	DENGAN ADANYA GEDUNG PAUD AKAN MEMPERLANCAR BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	DUSUN SENGGERING DESA TIANGKO, Kab. Merangin, Sungai Manau, Tiangko

27	kurang nya alat kesehatan	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	desa keroya, Kab. Merangin, Pamenang, Keroya
28	Sangat dibutuhkan pengadaan sarana air bersih Puskesmas Pembantu	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Rawa Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Rawa Jaya
29	Perbaikan sarana puskesmas	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Rejo Sari, RT.008 RW.004, Kab. Merangin, Pamenang, Rejo Sari
30	belum adanya pembangunan pagar Beton Puskesmas	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Rejo Sari, RT.008 RW.002 , Kab. Merangin, Pamenang, Rejo Sari
31	Penambahan sarana ruang IGD di Polindes	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Rejo Sari, RT.008 RW.004, Kab. Merangin, Pamenang, Rejo Sari
32	PUTSU Desa Nilo Dingin belum ada pagar	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	RT 05 Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai, Kab. Merangin, Lembah Masurai, Nilo Dingin
33	Perlu adanya pembangunan MCK di Puskesmas Pembantu Desa Sungai Sahut	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jl. Mentawai Desa Sungai Sahut, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sungai Sahut
34	KURANGNYA SARANA KESEHATAN BERUPA POSYANDU DAN RUANG BERSALIN	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Suko Rejo, Kab. Merangin, Margo Tabir, Suko Rejo

35	KURANG MEMADAI ALAT KESEHATAN YANG ADA DAN PERLU BANTUAN ALAT KESEHATAN YANG MEMADAI SEBANYAK 8 PAKET	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Suko Rejo, Kab. Merangin, Margo Tabir, Suko Rejo
36	Belum tersedianya tempat ibadah / mushola di Puskesmas Sungai Bulian sehingga tenaga kesehatan dan keluarga pasien dalam menjalankan ibadah menggunakan ruang rawat kerja dan ruang inap, maka dibutuhkan pembangunan mushola	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
37	Belum adanya ruang tunggu khusus untuk keluarga pasien rawat inap, sehingga ruang rawat inap tampak penuh, sehingga diperlukan pembangunan ruang tunggu keluarga pasien rawat inap agar pasien tidak merasa terganggu	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
38	Ruang rawat inap yang tersedia belum mencukupi untuk pasien rawat inap, sehingga diperlukan pembangunan ruang rawat inap lagi untuk menunjang pelayanan di Puskesmas	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
39	Rumah dinas yang ada belum mencukupi untuk para medis yang ada, sehingga diperlukan pembangunan rumah dinas lagi untuk menunjang pelayanan di Puskesmas	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian

40	Mobil ambulance yang ada di Puskesmas sudah rusak, sehingga diperlukan pengadaan mobil ambulance double gardan untuk menunjang pelayanan di puskesmas dan untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam merujuk pasien ke rumah sakit	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
41	Perlunya pembangunan pagar keliling di Puskesmas Desa Sungai Bulian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
42	Perlunya pembangunan koridor/selasar dari UGD ke Ruang Rawat Inap di Puskesmas Sungai Bulian dengan ukuran 30 x 2 M untuk memudahkan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
43	Rumah dinas yang ada sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan tetap sedang rumah dinas untuk menunjang pelayanan kesehatan	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
44	Box culvert yang ada sudah mengalami kerusakan sehingga diperlukan pembangunan box culvert Jalan masuk ke Puskesmas Sungai Bulian untuk memudahkan tenaga kesehatan dan pasien	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian

45	Kondisi halaman puskesmas yang licin dan becek pada musim penghujan menghambat pelayanan kesehatan sehingga diperlukan pembangunan paving blok untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas Sungai Bulian	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Puskesmas Sungai Bulian Jalan Garuda, Kab. Merangin, Tabir Timur, Sungai Bulian
46	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Sungai Jering, Kab. Merangin, Pangkalan Jambu, Sungai Jering
47	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Sungai Jering, Kab. Merangin, Pangkalan Jambu, Sungai Jering
48	karena jarak dan waktu ketika ada masyarakat sakit untuk dibawa ke RS untuk sementara warga berobat di lingkup kesehatan desa yaitu polindes dan pustu namun masih ada beberpa sarana dan prasarana penunjang yang harus di lengkapi	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	DESA BUKIT BERINGIN, Kab. Merangin, Bangko Barat, Bukit Beringin
49	Kondisi alat penunjang Puskesmas Pembantu yang kurang memadai	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Bungo Tanjung, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Bungo Tanjung
50	perlunya penambahan gedung rawat inap bagi puskesmas muara delang, mengingat banyaknya penduduk di muara delang	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Jl. Beliak Mata, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Muara Delang
51	pendukung dipustu dengan halaman yang becek saat hujan sehingga menghambat pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Jl. Abdul Manaf RT.009 Desa Sinar Gading, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sinar Gading

52	membutuhkan pembuatan paving blok di halaman pustu Desa karena sangat becek dan licin saat musim hujan sehingga menghambat pelayanan kesehatan masyarakat dan pembuatan MCK PUSTU GUNA PENDUKUNG PASIEN SAAT PERAWATAN	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	Jl.Abdul Manaf RT.009 Desa Sinar Gading, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Sinar Gading
53	Tidak Ada ruangan IGD Puskesmas Desa Muara Kibul	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Muara Kibul, Kab. Merangin, Tabir Barat, Muara Kibul
54	masih banyak peralatan yang belum memadai untuk meningkatkan fasilitas kesehatan puskesmas desa mauara kibul	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Muara Kibul, Kab. Merangin, Tabir Barat, Muara Kibul
55	Belum ada alat laboratorium sederhana	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Lingkungan Talang Kawo Rt 17 RW 07, Kab. Merangin, Bangko, Dusun Bangko
56	Rehabilitas gedung pelayanan UPTD Puskesmas	Belum Optimalnya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah (bangunan pemerintah)	RT 24 RW 06, Kab. Merangin, Bangko, Pematang Kandis
57	Karena belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk posyandu Lestari Waras dan Posyandu Sumber Waras, mohon untuk kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial (Pembangunan Mesjid, gapura, Mushola, Ponpes) sesuai prioritas dan kondisi riil di lokasi	Desa Gading Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Gading Jaya
58	Mohon meningkatkan pelayanan di puskesmas pembantu mohon untuk pembuatan pagar keliling	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jalan Garuda, Dusun Mekar Asri, Desa Gading Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Gading Jaya

59	Karena tempat persalinan bagi ibu hamil belum ada di Desa Gading Jaya, dan pada saat di Pustu harus digabung dengan warga yang sakit karena dipandang sangat tidak efisien melihat kondisi warga yang sakit dan ibu hamil yang akan melahirkan, mohon untuk pembangunan POLINDES karena di rasa sangat dibutuhkan	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Jalan Garuda, Dusun Mekar Asri, Desa Gading Jaya, Kab. Merangin, Tabir Selatan, Gading Jaya
60	Rehab gedung poskesdes, dikarenakan kondisi gedung yang kurang memadai untuk pelayanan masyarakat	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Poskesdes Desa Langling, RT.001/RW.001, Kab. Merangin, Bangko, Langling
61	Belum ada Puskesmas Pembantu/ Fasilitas Kesehatan lainnya dalam kondisi tidak layak melaksanakan pelayanan kesehatan	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Muara Bantan Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Renah Pembarap, Muara Bantan
62	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki Puskesmas Simpang Limbur Merangin membuat pelayanan tidak maksimal maka Pembangunan Aula Puskesmas Simpang Limbur	Masih belum memadainya pelayanan jalan/jembatan kewenangan kabupaten	SIMPANG LIMBUR MERANGIN, Kab. Merangin, Pamenang Barat, Simpang L. Merangin
63	Karena belum memiliki pagar dan akses halaman puskesmas becek ketika hujan jadi membutuhkan conblock	Belum optimalnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Pustu desa Bukit Bungkul, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Bukit Bungkul
64	Masih kurangnya pusat informasi ,literasi,dan advokasi kebijakan di bidang kesehatan di desa	Belum optimalnya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	Desa Bukit Bungkul, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Bukit Bungkul
65	tidak adanya gedung rawat inap	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Kota raja , Kab. Merangin, Tabir Ilir, Kota Raja

66	tidak adanya gedung aula untuk puskesmas	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial (Pembangunan Mesjid, gapura, Mushola, Ponpes) sesuai prioritas dan kondisi riil di lokasi	desa kota raja, Kab. Merangin, Tabir Ilir, Kota Raja
67	untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan di masyarakat	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Selango, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Selango
68	untuk meningkat kenyamanan dan keamanan lingkungan yang ada di pustu	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Selango, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Selango
69	untuk meningkat pelayanan masyarakat yang butuh perawatan dan pengobatan di pustu	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Selango, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Selango
70	sangat di butuhkan penunjang atau prasarana puskesmas pembantu desa mampun baru sesuai dengan standar pelayanan	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	puskesmas pembantu desa mampun baru, Kab. Merangin, Pamenang Barat, Mampun Baru
71	Kurang tersedianya unit komputer Puskesmas Meranti	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Puskesmas Meranti Desa Meranti, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti
72	Keberadaan ambulan di Puskesmas Meranti sebagai sarana penunjang medik pelayanan kesehatan dianggap masih kurang, sehingga kedepannya diharapkan adanya penambahan 1 unit ambulan di Puskesmas Meranti	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	PKM Meranti Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti

73	Dikarenakan kondisi bangunan Puskesmas Meranti yang dibangun sejak 1980 dan sudah tidak mampu untuk melayani rawat inap, serta juga mengingat banyaknya pasien yang datang ke Puskesmas Meranti, maka perlu dibangun Rumah Sakit Tipe D yang mana dapat menjadi Rumah Sakit Rujukan untuk 12 Desa di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin.	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Meranti Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Kab. Merangin, Kab. Merangin, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti
74	untuk menambah keamanan, kebersihan dan kenyamanan puskesmas tambang emas, dibutuhkan pembangunan Pagar puskesmas tambang emas 500M	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Tambang Emas RT 25, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Tambang Emas
75	belum tersedianya gedung UGD Puskesmas Tambang Emas, dibutuhkan Bangunan Gedung UGD 1 unit dan Gedung Bersalin Puskesmas 1 Unit.	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Desa Tambang Emas 25, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Tambang Emas
76	Tempat parkir kurang memadai Puskesmas Meranti	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Puskesmas Meranti, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Meranti
77	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (di Perlukan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik) Sebanyak Satu Paket	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu

78	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik), di Perlukan Pembangunan Pagar dan Mebeler di Posyandu Sebanyak 3 (tiga) Unit Posyandu	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu
79	Masih banyaknya prasarana Kesehatan (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik), Perlu Rehap Rumah Bidan Desa Lantak Seribu 1 Unit	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Dusun Sumber Mulyo Desa Lantak Seribu Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin, Renah Pamenang, Lantak Seribu
80	kurangnya mubeler posyandu	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Fasilitas umum/Sosial (Pembangunan Mesjid, gapura, Mushola, Ponpes) sesuai prioritas dan kondisi riil di lokasi	desa kota raja, Kab. Merangin, Tabir Ilir, Kota Raja
81	Pagar keliling 350 M	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Muara Jernih.Kab Merangin, Kab. Merangin, Tabir Ulu, Muara Jernih
82	Ambulance	Minimnya Sarana Prasarana Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran di Fasum dan Fassos (Hydrant, APAR dan Media Informasi)	Desa Muara Jernih Kec, Tabir Ulu kab Merangin, Kab. Merangin, Tabir Ulu, Muara Jernih
83	Rumah Medis	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Desa Muara Jernih,Kab Merangin, Kab. Merangin, Tabir Ulu, Muara Jernih

84	PUSTU yang ada saat ini hanya berukuran 4 x 4 m dan sangat tidak memadai, untuk pelayanan kesehatan, jarak desa ke pasilitas kesehatan terdekat berjarak 14 KM dan menjadi kendala terberat bagi masyarakat yang sedang sakit.	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	RT 2 Dusun I Desa Pulau Bayur, Kab. Merangin, Pamenang Selatan, Pulau Bayur
85	Belum Optimalnya Pemberian makan tambahan (PMT),kursi plastik posyandu 10 buah,Dopler,HB digital,Tensi Digital,Pita Senti Meter,Mesin Sanyo,Kawar duri,Pintu Pagar Roling Besi Posyandu 1 set,Tralis pintu Besar 2 pintu,Tralis Pintu Jendela 14 lobanng,Pintu Kaca Jendela 4 Lobang.	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	Desa Muara Jernih,Kab Merangin, Kab. Merangin, Tabir Ulu, Muara Jernih
86	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tes saja jagang diterima Gedung puskesmas rusak berat, atap bocor perlu penggantian atap sebanyak 5 ruang	Dusun 1 RT 14, Kab. Merangin
87	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Kondisi Pustu Desa Guguk tanpa adanya Pagar Pembatas, sehingga di khawatirkan terjadi sangketa dikemudian hari. Diperlukan pembangunan pagar keliling sepanjang 50 meter untuk menyelesaikan permasalahan tersebut	RT 007 RW RW 002 Dusun Simpang Guguk, Desa Guguk, Kab. Merangin
88	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	belum adanya mobil ambulance desa untuk membawa masyarakat yang ingin berobat.	desa karang anyar, Kab. Merangin

89	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	masih banyak nya masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan (BPJS) gratis	desa karang anyar, Kab. Merangin
90	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	belum terpenuhinya alat-alat kesehatan Pustu dan Polindes	desa karang anyar, Kab. Merangin
91	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	butuhnya rehab berat Ruang UGD di puskesmas Sungai Manau	Puskesmas dusun Tengah Desa Sungai Manau, Kab. Merangin
92	kurangnya jumlah puskesmas rawat inap	Rehab Sedang gedung Rawat jalan	Puskesmas dusun Tengah Desa Sungai Manau, Kab. Merangin
93	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Butuh nya Paving Blok untuk Area Puskesmas	Peskesmas Dusun Tengah desa Sungai manau, Kab. Merangin
94	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tidak adanya tenaga ahli gizi dipuskesmas sekancing menyebabkan berkurangnya kelayakan dan kurang optimalnya puskesmas dalam melayani msyarakat, oleh karena itu perlu adanya Pengadaan Tenaga Kesehatan Gizi sebanyak 1 Orang guna memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat	RT. 001 RW. 001/Dusun I, Kab. Merangin

95	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	tidak adanya tenaga labor dipuskesmas sekancing menyebabkan berkurangnya kelayakan dan kurang optimalnya puskesmas dalam melayani msyarakat, oleh karena itu perlu adanya Pengadaan Tenaga labor sebanyak 1 Orang guna memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat	RT. 001 RW. 001/Dusun I, Kab. Merangin
96	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	jarak renah pelaan ke puskesmas kecamatan cukup jauh di sebabkan jalan yang buruk, jika masyarakat ada yang saki,atau mau melahirkan kondisi puskesdes yang ada peralatan jauh dari lengkap untuk itu kami mohon bantuan Peralatan kesehatan yang lengkap	Renah pelaan, Kab. Merangin
97	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	Perlu nya Rehabilitas gedung puskesdes	Puskesdes Pasar Baru Rantau Panjang, Kab. Merangin
98	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	perlunya rehab gedung puskesdes, pengadaan lemar, meja, tempat tidur, kursi pelayanan	peskesdes, Kab. Merangin
99	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	pembangunan gedung aula, rehabilitas jlan masuk ke puskesmas, rehab lantai keramik, dan rehab gedung puskesmas pasar baru rantau panjang	puskesmas pasar baru rantau panjang, Kab. Merangin
100	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	batuan bpjs kesehatan bagi masyrakat miskin, masih banyak warga miskin yang belum mendapat program PBI JKN 65 kk	desa Biuku Tanjung, Kab. Merangin

101	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	perlunya rehap gedung puskesmas pasar baru	puskesmas pasar baru, Kab. Merangin
102	Masih banyaknya prasarana puskesmas yang tidak sesuai dengan standar kesehatan nasional (Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik)	perlunya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	puskesmas , Kab. Merangin
103	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	perlunya pembangunan gedung aula puskesmas pasar baru	puskesmas pasar baru, Kab. Merangin
104	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehap jalan akses masuk puskesmas pasar baru	puskesmas pasar baru, Kab. Merangin
105	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehap lantai keramik puskesmas pasar baru	puskesmas , Kab. Merangin
106	kondisi fisik puskesmas dalam kondisi tidak layak untuk melaksanakan pelayanan kesehatan	rehap gedung pencatatan puskesmas	puskesmas, Kab. Merangin